



**IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI  
SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI  
DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)  
KABUPATEN SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Wakhidatul Afifa

NIM 3401407075

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Senin

Tanggal : 4 Juli 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Puji Lestari, S.Pd, M.Si  
NIP. 19770715 200112 2 008

Martien H. S., S.Sos, M.Si  
NIP. 19730331 200501 2 001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

PERPUSTAKAAN  
**UNNES**

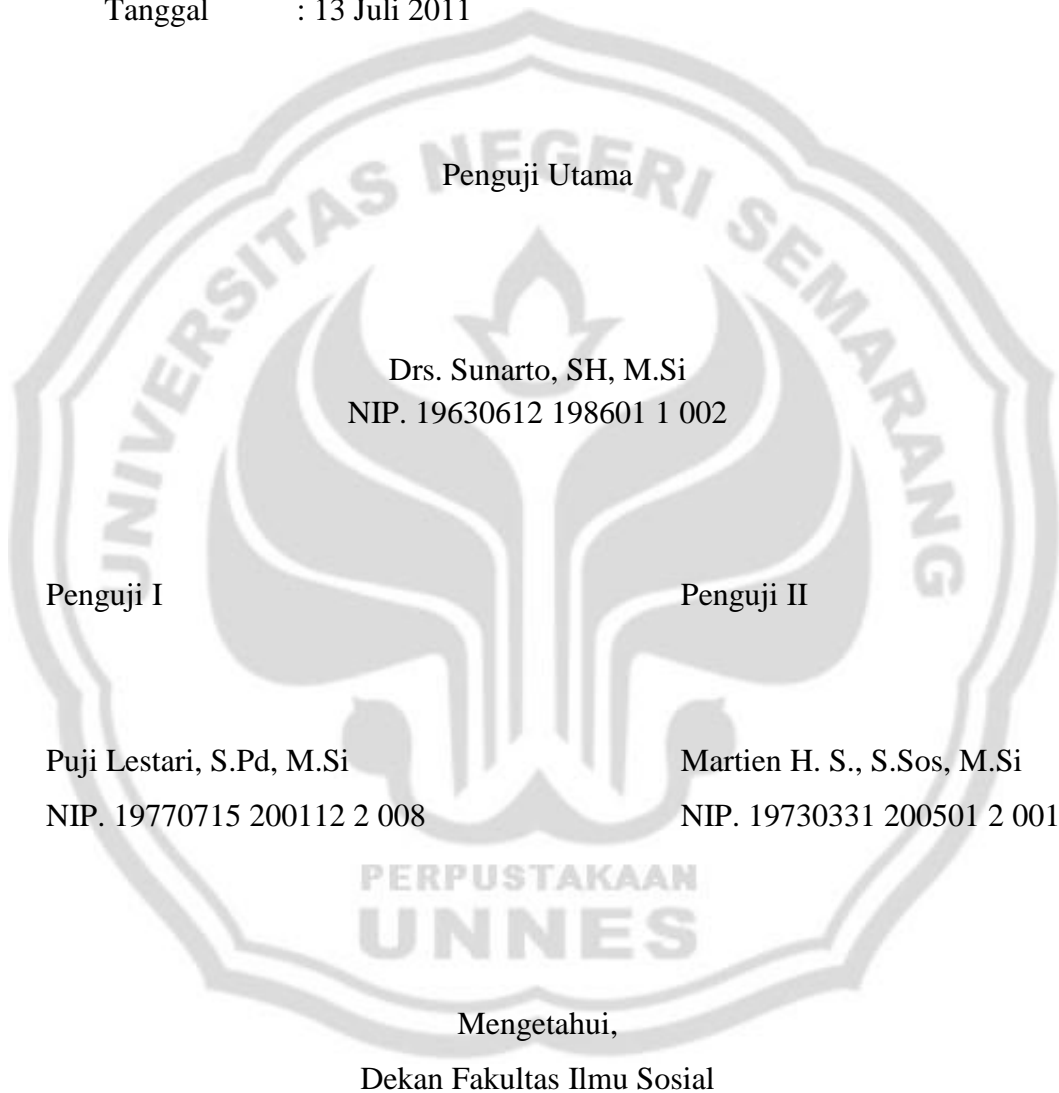
Drs. Slamet Sumarto, M. Pd  
NIP. 19610127 198601 1 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Juli 2011



Drs. Subagyo, M.Pd  
NIP. 19510808 198003 1 003

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan dari jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 04 Juli 2011

Wakhidatul Afifa

NIM. 3401407075



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tujuh hal yang akan menghancurkan kita: Kekayaan tanpa kerja, Pengetahuan tanpa karakter, Bisnis tanpa moralitas, Ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan, Ibadah tanpa pengorbanan dan Politik tanpa prinsip”. (Mahatma Gandhi)*

*“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”. (Bung Karno)*

*“Kebenaran politik adalah tirani dengan tata krama”. (Charlton Heston)*

*Teriring rasa syukur kehadirat ALLAH SWT  
yang memberikan akal budi untuk berfikir, serta  
shalawat atas Nabi Muhammad SAW,  
Kupersembahkan karya ini kepada Ayah Bundaku  
yang telah memberikan doa dan dukungan,  
Haries Kurniawan sebagai mata tangan kaki  
pikiran dan jiwa keduaku,  
Sahabat-sahabat seperjuangan PKn '07,  
serta almamater tercinta,  
Universitas Negeri Semarang (UNNES).*

## SARI

**Afifa, Wakhidatul.** 2011. *“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang”*. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

**Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).**

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik. Anggota yang telah direkrut oleh partai, dilanjutkan dengan kaderisasi yang berguna bagi partai untuk kepentingan rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan dalam pemerintahan, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya istilah kader loncatan, kader karbitan atau kader titipan, sehingga menarik untuk dijadikan penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang beserta faktor pendorong dan penghambatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang beserta faktor yang mendorong dan menghambat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif supaya penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dapat dideskripsikan secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari penelitiannya. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen, serta anggota/kader PDI Perjuangan yang dipilih secara acak oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi PDI Perjuangan kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai. Mekanisme pendaftaran anggota dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, masa pembinaan, pelantikan dan sumpah, pengesahan, diberi KTA dan ditulis dibuku induk. Implementasi rekrutmen pengurus DPC

dilakukan melalui Konfercab setiap lima tahun sekali. perekrutan dimulai dengan memilih ketua DPC dari calon ketua yang namanya diusulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat PAC. Ketua terpilih menjadi ketua formatur yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyusun kepengurusan DPC. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mempunyai 19 PAC sehingga dalam pembentukan pengurus DPC berjumlah 15 orang. Implementasi rekrutmen calon anggota legislatif dilakukan melalui tahap penjarangan, tahap penyaringan, dan tahap penetapan yang diatur dalam SK No 210/KPTS/DPP/V/2008. Implementasi rekrutmen calon bupati dan/atau calon wakil bupati dilakukan melalui tahap penjarangan, tahap penyaringan tahap I (satu) dan tahap II (dua) yang diatur dalam SK No 031/KPTS/DPP/X/2009. Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah: 1) kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang berbasis nasionalis sesuai basis PDI Perjuangan, 2) pengorganisasian partai yang solid sampai Anak Ranting, 3) organisasi sayap PDI Perjuangan yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, 4) keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, dan 5) kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan Megawati. Faktor penghambatnya adalah: 1) dana, 2) SDM, 3) citra negatif tentang partai politik dan PDI Perjuangan. 4) kurang optimalnya kaderisasi, dan 5) program kerja partai yang jarang terealisasikan. Upaya PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan rekrutmen politik dengan cara: 1) mengoptimalkan kaderisasi, 2) merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat, dan 3) penguatan infrastruktur partai salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya saja kaderisasi untuk mencetak SDM yang berkualitas perlu dioptimalkan. Saran dalam penelitian adalah PDI Perjuangan perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil, mengoptimalkan kembali kaderisasi, mengembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh PDI Perjuangan, serta menampilkan eksistensi partai sehingga masyarakat dapat lebih mengenal PDI Perjuangan.

## PRAKATA

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, penguasa segala yang ada di bumi dan langit yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang”** dengan baik. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I di Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih secara khusus penulis haturkan kepada Bunda Siti Makfiah dan Ayah Ahmadi sebagai sumber doa dan semangat, Belahan jiwa yang senantiasa memotivasi dan mendoakan kesuksesan penulis. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Puji Lestari, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Martien Herna S., Sos., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dalam penyusunan skripsi ini.



5. Segenap dosen pengajar Universitas Negeri Semarang khususnya di prodi PPKn, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. H. Bambang Kusriyanto, B.Sc selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yang telah memberikan ijin penulis melaksanakan penelitian.
7. Bapak Koes Pujiharto, Bapak Bondan Marutohening, Bapak Tejo Wahono serta pengurus dan staf DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yang telah memberikan informasi dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Haries Kurniawan beserta Bapak Ibu Mundjahid, yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi sampai selesainya skripsi ini.
9. Kakakku Fajar Efendi, sobatku Yuniarani, Heru, Istianah, Iftania, Titis serta sobat senasib seperjuangan skripsi Wiji Kewik, Dewi Ariyani dan Oriyana.
10. Sahabat-sahabatku PPKn angkatan 2007, yang dengan kebersamaannya mewarnai kehidupan di UNNES.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran.

Penulis menyadari bahwa tiada karya anak manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu juga dalam penulisan skripsi ini memerlukan kritik dan saran yang membangun sebagai masukan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, Juli 2011

Penulis,

**Wakhidatul Afifa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SARI</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penegasan Istilah .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Partai Politik .....	10
B. Tujuan dan Fungsi Partai Politik .....	17

C. Rekrutmen politik .....	21
D. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan .....	29
E. Kerangka Berpikir .....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Fokus Penelitian .....	38
D. Sumber Data Penelitian .....	38
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Keabsahan Data .....	43
G. Metode Analisis Data .....	44
H. Prosedur Penelitian .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan .....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	102
B. Saran .....	104

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

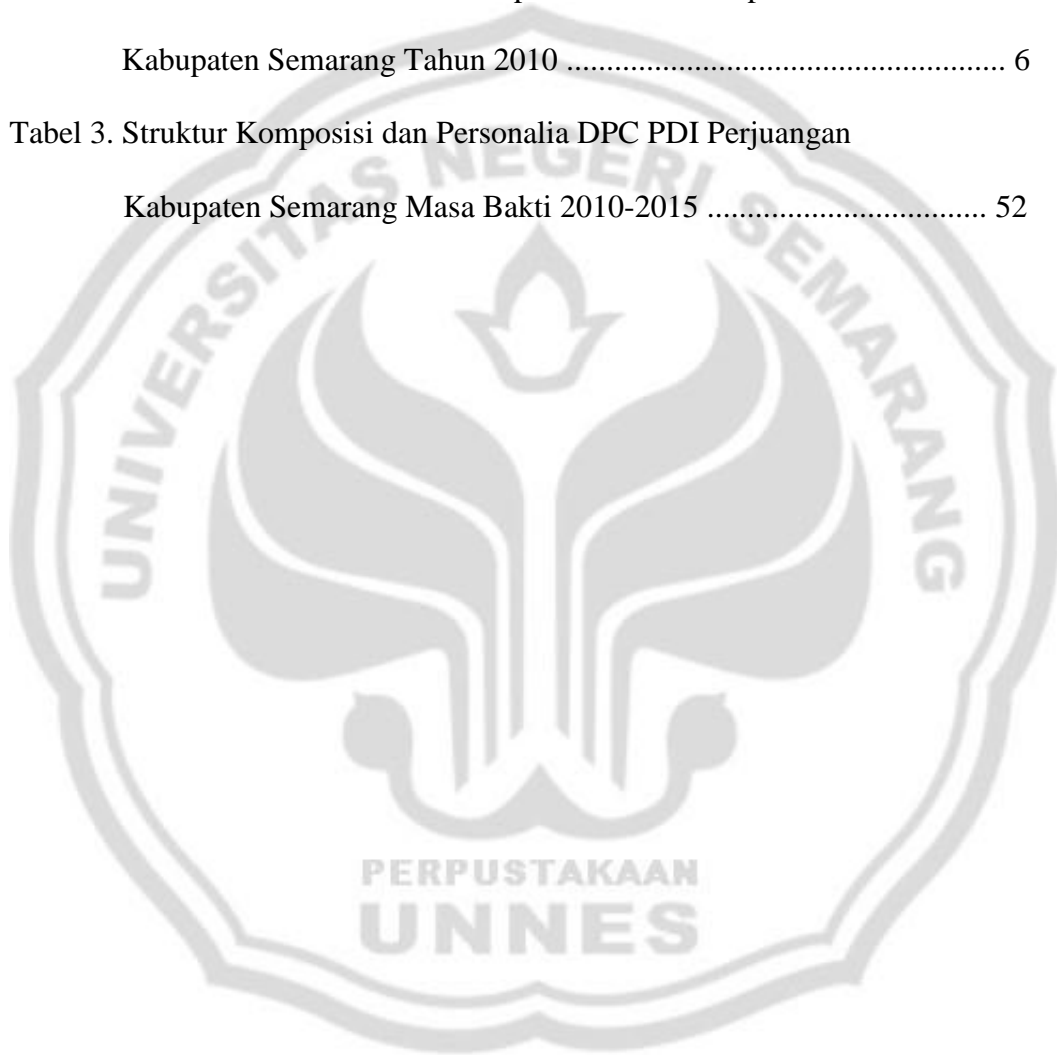
## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan ijin penelitian.
2. Surat bukti telah melaksanakan penelitian.
3. Pedoman dan hasil wawancara.
4. Foto dokumentasi penelitian.
5. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang mengenai: 1) perolehan suara partai politik se Kabupaten Semarang dalam pemilu anggota DPRD kabupaten tahun 2009, 2) perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Pemilu anggota DPRD kabupaten tahun 2009, dan 3) perolehan suara dalam Pemilu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2010.
6. Formulir daftar riwayat hidup dan registrasi ulang anggota PDI Perjuangan.
7. Formulir rekrutmen calon anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten periode 2009-2014.
8. Formulir data pendukung diri calon anggota DPR RI/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten periode 2009-2014.
9. Surat Ketetapan Nomor 04.23-A/TAP-DPC/DPP/XII/2010 tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.
10. Surat Keputusan Nomor 101/KPTS/DPP/I/2007 tentang Sistem Penerimaan Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan PDI Perjuangan.

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD	
Kabupaten Semarang Tahun 2009 .....	5
Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
Kabupaten Semarang Tahun 2010 .....	6
Tabel 3. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan	
Kabupaten Semarang Masa Bakti 2010-2015 .....	52



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Contoh KTA PDIP tampak dari depan .....	59
Gambar 2. Contoh KTA PDIP tampak dari belakang .....	60



## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka berpikir penelitian .....	35
Bagan 2. Mekanisme penerimaan anggota PDIP .....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 menetapkan bahwa, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, maka di Indonesia dibentuklah sistem perwakilan politik sebagai wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat (Maran, 2007:201). Perwakilan sebagaimana diartikan Alfred de Grazia dalam Sanit (1985:1) adalah hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dan terwakil dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuat dengan terwakil.

Gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam negara demokrasi mempunyai dasar ideologis, bahwa dalam proses pemberian suara, rakyat menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk memilih siapa yang layak memerintah mereka dan menentukan wakil-wakil mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum (*public policy*). Selain itu, sebagai suatu negara demokrasi, Indonesia harus mengakui dan menghormati adanya Hak Asasi Manusia (HAM), artinya Indonesia harus mengakui hak-hak warga negara, antara lain; hak untuk berkumpul, mendirikan perserikatan, menyatakan



pendapat dan pemikirannya. Perkumpulan dan perserikatan dapat dilihat dari adanya organisasi kemasyarakatan, serikat kerja, LSM dan partai politik.

Dewasa ini istilah politik dan partai politik sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2008:15). Sedangkan partai politik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai berikut.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokratis. Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai landasan hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keberadaan partai politik tidak terlepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pembuat kebijakan (Suprihatini, 2008: 19).

Salah satu fungsi partai politik yang berkaitan dengan sistem demokrasi adalah seleksi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang disebut rekrutmen politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Pengrekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal (Rush dan Althoff, 2000: 23). Rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting bagi kontinuitas dan kelestarian partai politik itu sendiri, dalam artian perekrutan terhadap anggota dan kader partai, serta dengan seleksi dan kaderisasi berguna untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Berkaitan dengan rekrutmen politik diatur sebagaimana bunyi Pasal 11 ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan perjuangan dalam pengisian jabatan politik, merupakan indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai politik di Indonesia, dalam pelaksanaan rekrutmen politik sendiri, sering ditemukan fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, atau kepentingan pribadi sehingga seseorang mudah menjadi pengurus partai. Fenomena seperti itu dikenal dengan sebutan kader

karbitan atau kader titipan. Tidak jarang pula demi kepentingannya, kader suatu partai pindah kepartai lain yang disebut kader loncatan. Mengenai kecurangan-kecurangan dalam proses rekrutmen politik ini, Bambang Kusriyanto (ketua DPRD Kabupaten Semarang) dalam Interupsi (2010: 25) yang berjudul *Peran Parpol Dalam Membangun Kehidupan Demokrasi*, mengatakan sebagai berikut.

“Bila parpol ingin eksistensinya terjaga, maka perlu adanya langkah-langkah konstruktif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sebagai pendukung. Beberapa masalah yang patut dicermati untuk direnungkan adalah sbb: (1) ...; (2) Penempatan kader-kader parpol di lembaga legislatif harus lebih selektif. Upaya ini dapat dilakukan melalui sistem penjaringan dan penyaringan secara ketat sesuai dengan norma-norma rekrutmen kader yang berlaku di partai. Hindarkan rasa *ewuh pakewuh* yang terkadang masih menyelimuti perasaan. Dengan demikian, maka tidak ada lagi kesan kader titipan, kader karbitan, kader kutu loncat dsb. Hal ini perlu dilakukan demi citra parpol dan lembaga legislatif yang akhir-akhir ini mendapatkan stigma buruk dari masyarakat; (3) Parpol harus menjadikan dirinya sebagai Organisasi kader. Diharapkan dari rahim parpol akan dilahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkualitas.”

Sumber daya yang paling utama dalam berpolitik adalah sumber daya manusia, karena partai politik tidak digerakkan oleh mesin dan teknologi, tetapi oleh manusia. Dengan demikian, cara organisasi partai politik dalam mendapatkan manusia yang memiliki kemampuan dan integritas tinggi merupakan tantangan utama dalam hal manajemen organisasi partai politik (Firmanzah, 2008:248). Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen, tentunya orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk memperebutkan orang-orang berpotensi yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya.

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar dan memiliki massa yang cukup banyak, salah satu contohnya di tingkat Kabupaten Semarang. PDI Perjuangan Kabupaten Semarang merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dari 25 partai politik peserta pemilu legislatif 2009 yaitu dengan 99.831 suara dari total suara sah sebanyak 489.873 (data KPU Kabupaten Semarang), serta memperoleh kursi terbanyak di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pemilihan legislatif 2009. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel 1 yang disajikan berikut ini.

**Tabel 1** Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Semarang Tahun 2009

<b>NO. URUT PARTAI</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	4
9	Partai Amanat Nasional	5
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5
23	Partai Golongan Karya	5
24	Partai Persatuan Pembangunan	5
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8
31	Partai Demokrat	6
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Selain sebagai partai politik dengan perolehan suara terbanyak di legislatif, PDI Perjuangan juga berhasil memenangkan pasangan Mundjirin-Warnadi dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Semarang 2010. Berikut ini gambaran hasil perolehan suara Pilkada Kabupaten Semarang 2010 disajikan dalam tabel 2.

**Tabel 2** Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Tahun 2010

NO.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1	Dr. H. Mundjirin ES, S.POG dan Ir. H. Warnadi, MM	<b>205.382</b>
2	Dr. H.Subroto, SE, MM dan Atika Arisanti, S.Sos	<b>60.559</b>
3	Hj. Siti Ambar Fatonah, S.PdI dan Wuwuh Beno Nugroho, SH	<b>193.077</b>

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

Sebagai partai besar, PDI Perjuangan memiliki kader dan simpatisan yang tersebar diseluruh Provinsi di Indonesia, maka dari itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sangat disoroti dan diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan fungsinya sebagai partai politik, terlebih pada fungsi dalam melakukan rekrutmen politik.

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah rekrutmen politik yang dilaksanakan PDI Perjuangan tingkat Kabupaten Semarang, yaitu rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota dan kader dalam menggantikan anggota dan kader lama, rekrutmen untuk menjadi pengurus DPC, rekrutmen untuk menjadi calon wakil rakyat sebagai anggota legislatif, serta rekrutmen untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Semarang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pemmasalahan yang muncul dan menjadi objek penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya studi penelitian ini, diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian serta studi lebih lanjut terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya dibidang politik serta sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang memiliki arah permasalahan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang rekrutmen politik, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 di Universitas Negeri Semarang.
- b. Bagi partai politik, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan, diharapkan dapat memberikan masukan, tambahan informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan partai terutama yang berkaitan dengan rekrutmen partai politik.

## E. Penegasan Istilah

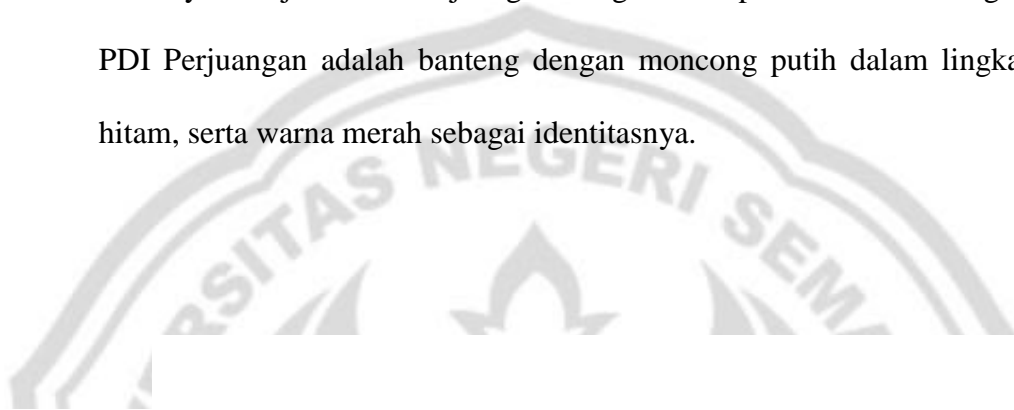
Agar lebih jelas dan mudah dimengerti dari judul penelitian ini, maka peneliti menggunakan penegasan dalam memberikan pengertian dari judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

### 1. Pelaksanaan Rekrutmen Politik

Pelaksanaan rekrutmen politik merupakan proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dan kader partai politik, serta mempersiapkan kader yang berbakat untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas yang bertugas sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan baik tingkat daerah maupun nasional.

## 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berbasis nasionalis dan memiliki jatidiri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Februari 1999, PDI telah mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan dengan asas pancasila. Lambang dari PDI Perjuangan adalah banteng dengan moncong putih dalam lingkaran hitam, serta warna merah sebagai identitasnya.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Partai Politik

Sebagai individu atau tepatnya sebagai suatu pribadi, manusia tak akan bisa hidup dan berkembang berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, dia membutuhkan masyarakat dan negara (Maran, 2007:7), dalam perspektif inilah manusia disebut sebagai makhluk politis. Manusia sebagai makhluk politis adalah sebagai pelaku kehidupan masyarakat dan negaranya, ia juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat atau warga dari suatu negara. Oleh karena itu kaitan antara manusia dengan politik sangat erat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu “polis” yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang “polis” adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles dalam Firmanzah (2008:48). Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, mulai banyak ilmuwan yang memberikan definisi tentang politik, antara lain adalah sebagai berikut.

Budiardjo (2008:15) mengatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

“Politik,” demikian penegasan Weber dalam Rush dan Althoff (2000:8), “... adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik, atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan, baik diantara negara-negara maupun diantara kelompok-kelompok di dalam suatu negara.”

Machiavelli dalam Firmanzah (2008:48) dari bukunya *The Prince* melihat politik sebagai aktivitas dan metode untuk mempertahankan serta merebut kekuasaan absolut.

Rod Hague et al. dalam Budiardjo (2008:16), “Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya”.

Andrew Heywood dalam Budiardjo (2008:16) mengemukakan “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.

Jadi politik adalah seluruh rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, serta cara bagaimana memperoleh kekuasaan itu untuk mempengaruhi dan mengatur kehidupan orang lain yang menjadi anggota-anggotanya agar bertindak sesuai yang diperintahkannya.

Politik erat kaitannya dengan partai politik. organisasi partai politik merupakan komponen yang penting sebagai bukti dari negara demokratis.

Partai politik di negara demokrasi dijadikan sebagai salah satu wadah dari aspirasi rakyat. Tanpa partai politik, mekanisme negara demokrasi tidak dapat berjalan secara efektif. Keberadaan partai politik juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

Kata partai berasal dari kata *pars* dalam bahasa Latin, yang berarti “pagian”, sedangkan dalam kamus Bahasa Inggris, kata partai adalah *party* berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), even sosial (seperti pesta), dan grup atau kelompok bersama (Hamid, 2008:4).

Definisi tertua partai politik, mungkin bisa dirujuk dari Edmund Burke, tokoh politik Inggris (1729-1797). Burke dalam Hamid (2008:4) pada tahun 1771 menulis bahwa partai adalah kumpulan orang-orang yang bertujuan untuk mempromosikan. Dengan usaha bersama, kepentingan nasional berdasarkan beberapa prinsip khusus yang telah mereka setuju bersama.

Max Weber dapat dikategorikan sebagai pendiri pemikiran politik modern, dalam Firmanzah (2008:66) Max Weber mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya yang berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Selanjutnya banyak ilmuwan lain yang memberikan definisi tentang partai politik, seperti yang dikemukakan oleh para ahli dalam Hamid (2008: 6-7) dibawah ini, sebagai berikut.

Sigmund Neuman mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan

pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan begitu partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Bagi Joseph La Palombara dan Myron Weiner, partai politik adalah organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan temporal dengan para pendukungnya di daerah. Menurut Roy C. Macridi, partai politik adalah asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi rakyat, dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing, dan memunculkan kepemimpinan politik, serta digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah.

Definisi yang agak belakangan, misalnya dikemukakan oleh Peter Schroder (2000), bahwa partai politik merupakan kelompok orang-orang berpendirian sama, yang mencari kekuasaan dan pengaruh ditingkat pemerintahan, untuk dapat mempengaruhi pembentukan kehendak/tujuan dan mewujudkan pandangan politik bersama.

Berikut ini beberapa pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar politik dalam buku *Partai Politik di Indonesia*, Suprihatini (2008:2) antara lain adalah sebagai berikut.

Robert M. Mac Iver dalam bukunya *Modern State* berpendapat bahwa “Partai politik adalah suatu perkumpulan yang diorganisasi untuk mendukung

suatu asas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.”

R.H Soltau dalam bukunya *Introduction to Politics* berpendapat bahwa “Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.”

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik, adalah sebagai berikut.

1. Organisasi jangka panjang. Organisasi politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. ... dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.
2. Struktur Organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pola interaksi yang teratur di antara keduanya. ... sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi.
3. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. ... ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi, dan ikatan.
4. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. ... semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya (Firmanzah, 2008: 67-68).

Selain pengertian-pengertian partai politik yang dikemukakan oleh para pakar di atas, di Indonesia sendiri ada beberapa definisi mengenai partai politik yang terkenal, anatar lain seperti dari:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008: 404).

Rusadi Kantaprawira mengatakan bahwa partai politik, yaitu organisasi manusia dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi (*ideal objective*), mempunyai program politik (*political platform, material objective*) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih pragmatis menurut penahapan jangka dekat sampai yang jangka panjang serta mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004: 63).

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partai politik adalah kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah guna melaksanakan alternatif kebijakan umum

yang mereka susun, sebagai hasil dari pemaduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (Hamid, 2008: 9).

Eap Saefulloh Fatah menguraikan pengertian partai politik adalah sebagai berikut.

1. merupakan kumpulan individu;
2. merupakan perkumpulan yang terorganisir dengan definisi mengenai posisi, fungsi, dan hirarki anggota yang jelas dan baku;
3. ada ikatan identitas yang sama di antara anggotanya, baik berupa ideologi maupun kepentingan;
4. memiliki tujuan memperoleh kekuasaan politik dalam pemerintahan; dan ikut serta dalam pemilihan umum untuk mencapai tujuannya (dalam Hamid, 2008: 9).

Jadi yang disebut partai politik adalah suatu organisasi yang terorganisir dan mempunyai cita-cita, ideologi, pandangan serta tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh kekuasaan dengan cara mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan agar dapat memegang kontrol terhadap pemerintahan.

Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat, muncul partai-partai baru seiring dengan perkembangan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi, terlebih lagi menjelang diadakannya pesta demokrasi yaitu pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan seleksi terhadap partai politik yang layak dan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, guna efisiensi partai politik itu sendiri. Partai politik di Indonesia memiliki corak, karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda, perbedaan tersebut tergantung dari jenis partai dan ideologi partainya. Keanekaragaman partai politik yang ada di negara Indonesia ini juga menjadi bukti atas penerapan dari negara demokrasi.

## B. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Kehadiran partai politik sebagai cerminan bahwa hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat, terutama hak menyatakan pendapat, maupun hak untuk berkumpul dan berserikat. Oleh sebab itu kehadiran partai politik dalam kegiatan politik memberi warna tersendiri, hal ini berdasarkan fungsi dan tujuan yang melekat pada partai politik. Tujuan dan fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa partai politik memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Begitu pula tujuan khusus partai politik yang disebutkan pada pasal 10 ayat 1 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
2. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Selain tujuan umum dan tujuan khusus, partai politik juga berwenang menyusun tujuan partainya, yang dapat dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik. Diatur pula mengenai fungsi partai politik yang tertulis dalam pasal 11, bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana sebagai berikut.

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Budiardjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menyebutkan ada 4 fungsi partai politik di negara demokrasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai sarana komunikasi politik  
Partai politik mengadakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*) yang berupa pendapat dan aspirasi, kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur atau dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Jika tidak ada agregasi dan artikulasi, maka pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan. Oleh karena itu dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi.  
Setelah itu partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan yang dimasukkan dalam program atau *platform* partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.
2. Sebagai sarana sosialisasi atau pendidikan politik  
Sosialisasi politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Merupakan bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang,

misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

3. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai sarana pengatur konflik

Konflik akan selalu ada dalam setiap masyarakat, terutama pada masyarakat yang sifatnya heterogen. Apakah dari segi etnis, sosial dan ekonomi, maupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan semaksimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya (Budiardjo, 2008: 405-409).

Selain fungsi-fungsi partai politik di negara demokrasi yang dikemukakan oleh Budiardjo diatas, dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik di Indonesia*, Suprihatini menyebutkan beberapa fungsi partai politik, antara lain adalah partai politik sebagai:

1. Sarana partisipasi politik;

Artinya, partai politik ini berupaya memobilisasi atau mengarahkan massa (warga negara) ke dalam kehidupan dan kegiatan politik. Fungsi ini merupakan fungsi yang khas bagi partai politik. Keberhasilan fungsi partai politik ditandai dengan semakin tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

2. Sarana artikulasi kepentingan;

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan maksudnya, partai politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan badan-badan politik yang lebih tinggi.

3. Sarana agregasi kepentingan;

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-

partai politik yang ada dalam pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan dalam penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

4. Sarana pembuat kebijakan;

Fungsi partai politik sebagai pembuat kebijaksanaan tidak terlepas dari latar belakang dibentuknya partai politik, yaitu untuk merebut kekuasaan di dalam pemerintahan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. ... dengan kata lain, kebijaksanaan pemerintahan merupakan tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan partai politik yang ada (Suprihatini, 2008: 19-20).

Menurut pendapat Sigmund Neumann dalam Hamid (2008: 12), partai politik dalam suatu negara demokrasi mempunyai empat fungsi, yaitu: *Pertama*, partai mengatur kehendak umum yang kacau; *Kedua*, mendidik warga negara untuk bertanggung jawab secara politik; *Ketiga*, menjadi penghubung antara pemerintah dan pendapat umum; dan *keempat*, memilih para pemimpin. Macridis mengemukakan bahwa:

“fungsi-fungsi partai politik yang diajukan oleh para ilmuwan politik dan sosiologi, seperti representasi (perwakilan), perantara (*brokerage*), konversi, dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, dan mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan perumusan kebijaksanaan; serta kontrol terhadap pemerintah tidaklah memberikan konseptualisasi yang memuaskan mengenai hubungan fungsi dan struktur politik. Karena itu, Macridis mengajukan satu fungsi dukungan (*supportive function*). ... Partai harus menciptakan dukungan pada sistem, ...” (dalam Hamid, 2008:14).

### C. Rekrutmen Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Sebagaimana disebutkan dari peran dan fungsi partai politik yang telah dipaparkan diatas, fungsi sebagai sarana rekrutmen politik merupakan fungsi yang penting, baik bagi kontinuitas

dan kelestarian partai politik itu sendiri maupun untuk mencetak pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Peran pemimpin erat hubungannya dengan kepemimpinan. Kepemimpinan diperlukan dalam suatu organisasi untuk memimpin orang-orang yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang banyak untuk bekerja sama guna suatu tujuan yang dijadikan keinginan mereka (Kantaprawira, 2004: 60). James A.F. Stoner dalam Umar (2005:31) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.

Para pemimpin yang berkualitas bermula dengan adanya seleksi kepemimpinan. Seleksi kepemimpinan yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini dilakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat (Kantaprawira, 2004:60).

Umar mengemukakan bahwa proses seleksi pada dasarnya merupakan usaha yang sistematis yang dilakukan guna lebih menjamin bahwa mereka yang diterima adalah yang dianggap paling tepat, baik dengan kriteria yang telah ditetapkan ataupun jumlah yang dibutuhkan. Usaha-usaha yang sistematis tadi misalnya dilakukan dengan tahap-tahap yaitu; 1) seleksi dokumen, 2) psikotes, 3) tes intelegensi, 4) tes kepribadian, 5) tes bakat dan kemampuan, 6) tes kesehatan, dan 7) wawancara (Umar, 2005: 8-9).

Berkaitan dengan masalah kepemimpinan ini, Heman Finer dalam Sastroatmodjo (1995:9) menyebutkan beberapa sifat ideal seorang pemimpin, yaitu sebagai berikut:

1. Kesadaran  
Seorang pemimpin harus dapat menguasai fakta-fakta yakni pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjalankan jabatannya.
2. Kebulatan pandangan  
Seorang pemimpin harus mampu menghubungkan berbagai cabang pengetahuan yang penting bagi kedudukannya.
3. Ketetapan jiwa  
Seorang pemimpin harus mempunyai ketetapan jiwa/emosi kelakuan, dan sikap, dan pemimpin yang demikian selalu menguasai setiap persoalan bila dibutuhkan, dan dia akan mampu menggunakan pikirannya secara tepat dalam setiap permasalahan yang muncul.
4. Keyakinan  
Seorang pemimpin memiliki berbagai macam ide, imajinasi, kebijaksanaan, dan prinsip-prinsip. Ia memiliki pola pandangan yang positif dan konstruktif tentang masyarakat yang baik dalam benaknya, yang diperjuangkan dengan gigih dan tepat
5. Kreativitas  
Kemampuan seorang pemimpin untuk menemukan hal-hal yang baru dan menerapkan kebijaksanaannya dalam situasi tertentu menciptakan segala keyakinan dalam kenyataan, berfikir jauh ke depan, sehingga pengetahuannya, ketetapannya, kebulatan pandangannya, keyakinannya akan diterapkan terhadap berbagai situasi yang belum pernah terjadi, tetapi telah terduga dan teramal sebelumnya.
6. Kepekaan hati nurani  
Seorang pemimpin terpanggil oleh hati nuraninya dan rasa tanggung jawabnya atas segala kualitas yang telah terurai di atas dan malah hal-hal lain yang harus diperinci lebih lanjut.
7. Keberanian  
Seorang pemimpin dengan hakekat kepemimpinannya harus berani mengambil resiko dan tidak menyerah pada perasaan / kepentingan subjektifnya.
8. Kemampuan memukau  
Kualitas yang dinamakan “daya pikat” atau kemampuan menawan hati rakyat melalui gaya pidato, pemunculan yang tepat dan anjuran tindakannya untuk melakukan sesuatu.
9. Kepandaian

Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan proses dua-arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah, karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu. Dengan cara yang sama, perekrutan ini bisa disebut formal, kalau para individu direkrut terbuka melalui cara institusional berupa seleksi atau pemilihan, dan disebut informal apabila para individunya direkrut secara *prive* (sendirian) tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional tadi (Rush dan Althoff, 2000: 23).

Michael Rush dan Phillip Althoff dalam bukunya *Pengantar Sosiologi Politik* (2000: 183) menyebutkan bahwa:

“Perekrutan orang-orang yang menjalankan kekuasaan politik, apakah hal itu dilakukan dengan menduduki jabatan politik seperti Perdana Menteri atau Presiden, anggota pemerintah atau menjabat Gubernur negara bagian, anggota dewan Kotapraja setempat atau Walikota, ataupun dengan menjadi anggota dalam birokrasi nasional atau birokrasi lokal dan menjadi pegawai sipil, administrator negara bagian atau pejabat pemerintah lokal. Demikian pula, perhatian tersebut jadi meluas sampai tertuju pada personil partai yang tengah berkuasa dan hirarki pemerintah dalam masyarakat totaliter.”

Rekrutmen politik yang dilakukan dalam lembaga negara Indonesia, yaitu rekrutmen politik untuk mengisi calon anggota DPR RI dan DPRD pada tingkat daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi

syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja (Gaffar, 2006: 8).

Sistem perekrutan politik tentu saja memiliki keragaman yang tiada batas, walaupun dua cara khusus yaitu seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dianggap sebagai yang paling penting. Kedua cara ini tentu saja juga memiliki banyak sekali keragaman, dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Selain cara-cara perekrutan yang biasanya diasosiasikan dengan perubahan-perubahan personil yang ekstensif, dengan perekrutan yang berkesinambungan dari tiga personil yang sama. Salah satu alat sedemikian ini adalah cara patronage; yaitu bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pelbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum dan merupakan dukungan dalam parlemen yang berlangsung diantara beberapa pemilihan umum. Cara lainnya adalah dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah. Selain itu terdapat suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-

tipe pemimpin tertentu adalah dengan jalan “koopsi” (pemilihan anggota baru). Secara tepat “koopsi” itu meliputi pemilihan seseorang kedalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada (Rush dan Althoff, 2000:186-191).

Setiap wakil tentulah dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian yang diperkirakan atau diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melayani tugas perwakilan. Ada dua teori klasik tentang hakikat hubungan wakil dan terwakil, yaitu teori mandat dan teori kebebasan. Dalam teori mandat dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik, oleh karena itu wakil hendaklah selalu memberikan pandangan, bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam teori kebebasan, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terikat secara ketat kepada terwakil. Karena diakuinya kebebasan wakil dalam melaksanakan tugasnya, maka wakil seperti itu disebut pula sebagai wakil yang bertipe wali dan sebaliknya wakil yang didasarkan kepada teori mandat disebut sebagai wakil yang bertipe utusan (Sanit, 1985:37).

Rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Fungsi ini dijalankan melalui pemunculan tokoh-tokoh partai untuk jabatan-jabatan publik; dalam sistem otoritarian ia ditunjuk atau diangkat, sedang dalam sistem politik demokratis ia dipilih melalui pemilihan umum (Hamid, 2008:11).



Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dibedakan antara rekrutmen politik di negara demokrasi dan rekrutmen di negara otoriter. Fungsi rekrutmen politik di negara demokratis, fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Budiardjo, 2008: 408).

Sedangkan di negara otoriter, partai politik juga berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik. Akan tetapi dalam hal ini ia mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdikan kepada partai, yang menguasai ideologi Marxisme-Leninisme, dan yang kelak mampu menduduki kedudukan pimpinan untuk mengawasi kegiatan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. ... karena iklim politik tidak kompetitif maka pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pimpinan negara, tetapi lebih bersifat sebagai tanda bukti dari loyalitas rakyat kepada negara dengan memilih calon yang ditentukan oleh partai (Budiardjo, 2008:412)

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artinya, partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik

sebagai anggota partai. Pengertian ini, berarti juga partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha dalam rekrutmen politik dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama di masa mendatang (Supihatini, 2008:19).

Pergantian pemimpin sangat diperlukan sebagai implementasi dari negara demokrasi. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan dan melakukan seleksi terhadap kader-kader pimpinan politiknya yang kemudian memperjuangkan kader yang berkualitas dan memiliki kredibilitas yang tinggi pada jabatan-jabatan politik. Secara umum dapat dinyatakan, semakin lama suatu partai berkuasa semakin besar pula kemungkinan mereka untuk menduduki jabatan pemerintah yang senior, dan harus pula menyiapkan diri untuk menempuh jalan hirarki kementerian. Betapapun juga, jika suatu partai terlalu lama berada dalam periode oposisi, kemudian mendapat kesempatan untuk berkuasa, maka pengangkatan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman sedemikian tadi untuk pos-pos senior (termasuk keanggotaan kabinet) adalah lebih besar kemungkinannya (Rush dan Althoff, 2000: 215).

Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Fungsi rekrutmen politik ini dapat juga disebut sebagai fungsi seleksi kepemimpinan (Sastroatmodjo, 1995:122).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab XI Pasal 29 mengatur ketentuan lebih lanjut dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu sebagai berikut disebutkan dalam ayat (1) sampai ayat (3):

Ayat (1): Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

1. anggota Partai Politik;
2. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
4. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Ayat (2): Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan; serta ayat (3): Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Firmanzah, (2008:70-71) memaparkan bahwa pemimpin yang berkualitas tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Tentunya orang yang memiliki ideologi yang sama dan memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga akan terjadi untuk

memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partai politiknya. Selain merekrut, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu agar lahir pemimpin yang berkualitas baik.

#### **D. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)**

Kesejarahan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebagai hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan murba pada 10 Januari 1973 menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang dalam perkembangannya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada tanggal 1 Februari 1999 menjadikan kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai jati diri partai; serta gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan terbuka sebagai watak partai (Mukadimah AD-ART PDI Perjuangan 2010-2015).

Selain nama, PDI Perjuangan juga mengubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran. Indonesia yang demokratis dihayati oleh PDI Perjuangan berupa adanya kesamaan hak antar warga negara secara utuh tanpa melihat latar belakang. Bahkan PDI Perjuangan

yakin akan kehilangan roh kepartaiannya bila masih mempermasalahkan daerah, suku, agama dan latar belakang lainnya (Litbang Kompas, 2004: 361).

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui kedaulatan anggota partai dan diselenggarakan sepenuhnya melalui kongres partai (Litbang Kompas, 2004:368).

PDI Perjuangan tidak terlepas dari sosok Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI Perjuangan. Dari sekian banyak partai politik yang lahir dari rahim reformasi PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati memiliki keunikan dalam dinamika politik Indonesia kontemporer. Keberadaan Megawati dan pengikutnya sebenarnya merupakan hasil perlawanan politik cukup panjang dari sebuah model ‘pembinaan politik’ warisan kolonial versi Orde Baru, yang selalu dipraktikkan terhadap partai politik yang dianggap potensial menyaingi ‘kebesaran Golkar’ dan ‘kharisma presiden’ sebagai ‘mesin kekuasaan’ dan ‘pusat kekuasaan’ Orde Baru (Hikam dkk, 1999: 41).

Keberadaan partai politik tidak pernah terlepas dari adanya peraturan-peraturan yang menjadi landasan partai politik untuk hidup dan melangkah di dunia politik. Selain adanya peraturan perundang-undangan berkaitan dengan partai politik yang dibuat pemerintah, PDI Perjuangan juga membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai yang digunakan sebagai pedoman intern partai.

Berkaitan dengan asas, jatidiri, dan watak dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tertulis dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar PDI Perjuangan, yaitu sebagai berikut.

1. Partai bersaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai jiwa dan semangat lahirnya pada 1 Juni 1945;
2. Jatidiri partai adalah kebangsaan, kerakyatan, dan Keadilan Sosial.
3. Watak Partai adalah gotong royong, demokratis merdeka, pantang menyerah dan terbuka.

Berkaitan dengan tugas, fungsi dan tugas dari PDI Perjuangan diatur dalam Anggaran Dasar PDI Perjuangan pada Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Pasal 6 mengatur tentang tujuan umum partai, yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. Membangun masyarakat pancasila 1 juni 1945 dalam negara kesatuan republik indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat,adil dan makmur.

Pasal 7 mengatur tentang tujuan khusus partai, yaitu sebagai berikut.

1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis, dan
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 8 mengatur mengenai fungsi partai, yaitu sebagai berikut.

1. Menjadi alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa.
2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat pancasila, dan
5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.

Pasal 9 mengatur mengenai tugas partai, yaitu sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 agustus 1945 di dalam negara kesatuan republik indonesia.
2. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
3. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
4. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara.
5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
6. Mempengarui dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam Piagam Perjuangan PDI Perjuangan tahun 2010-2015, dikatakan bahwa arah politik dan program PDI Perjuangan pertama-tama adalah menjadikan dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang menjamin tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala cita-cita luhurnya serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab, berkeadilan, bersih, dan berwibawa. Penuntasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan tegaknya hukum, pembagian, dan pembatasan kekuasaan yang memungkinkan berjalannya prinsip keseimbangan dan kesetaraan, dan berjalannya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan anggota PDI Perjuangan.

Dalam keberadaannya, PDI perjuangan juga memiliki platform. Platform adalah pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan partai. Dalam tulisannya tentang *PDI Perjuangan Langkah Menuju Reformasi Total*, Hikam (1999: 33) memaparkan bahwa “dengan tegas, PDI Perjuangan mendasarkan platform politiknya pada upaya pembentukan pemerintahan yang berdasarkan pada asa keadilan dan wibawa hukum.”

Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 1945, PDI perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita luhur bersama yaitu membangun dan mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas untuk: *Pertama*, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana termaktub dalam cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945. *Kedua*, menjaga dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan bernegara; sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat; sebagai norma pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai; dan sebagai cermin dari keseluruhan jatidiri partai. *Ketiga*, mengantarkan Indonesia untuk berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi perwujudan cita-cita bersama di atas (Mukadimah AD-ART PDI Perjuangan 2010-2015).



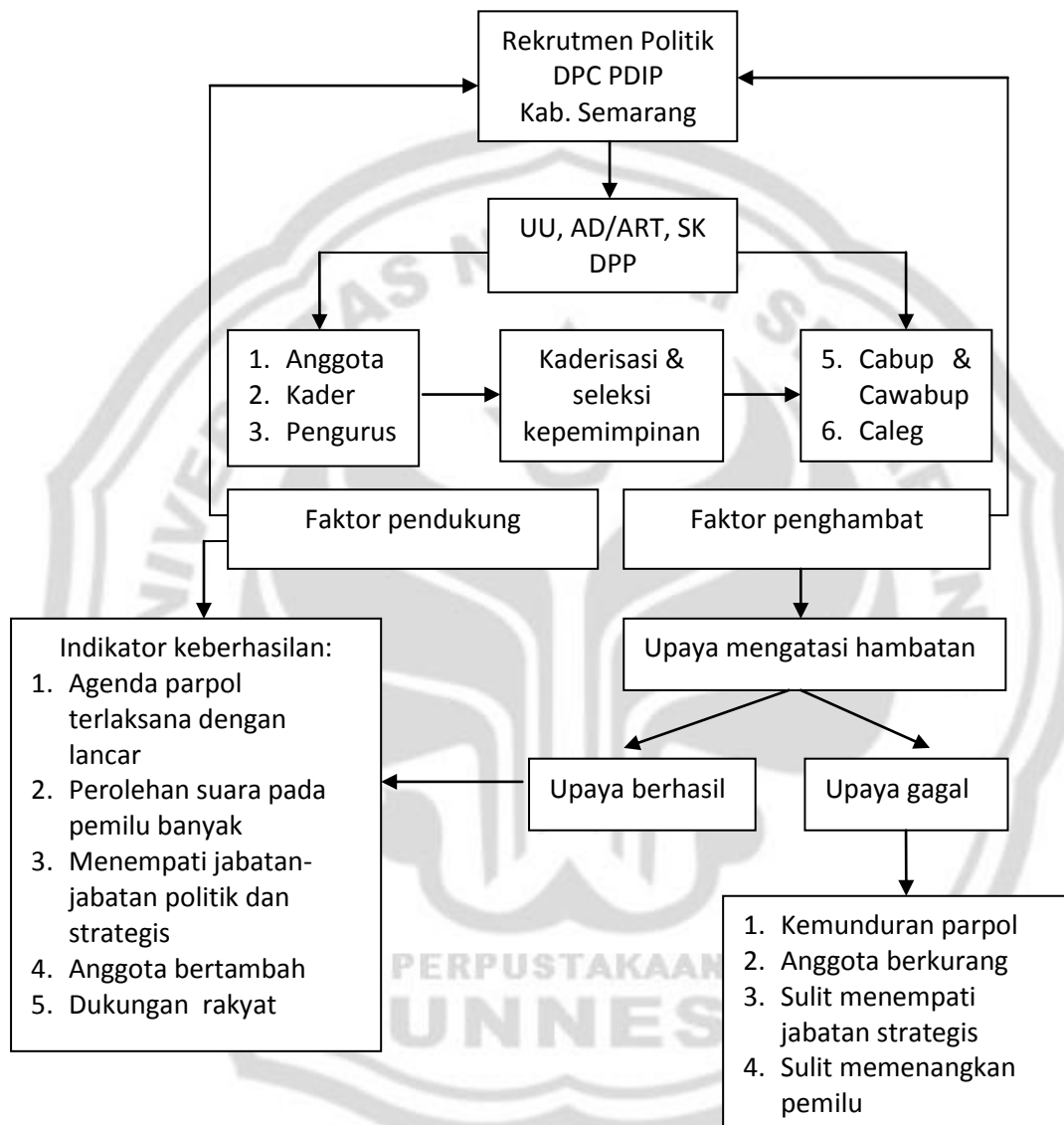
Dalam perjalanan pada pemilihan umum pasca Orde Baru, PDI Perjuangan selalu berada pada posisi lima besar dalam perolehan suara terbanyak. Seperti pada pemilu tahun 1999 PDI Perjuangan memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Pada pemilu 2004 perolehan suara PDI Perjuangan memperoleh peringkat kedua, dengan 109 kursi. Sedangkan dalam pemilu 2009 PDI Perjuangan mendapat 93 kursi di DPR dan menempati posisi ketiga dalam perolehan suara serta kursi di DPR ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

PDI perjuangan juga berani menunjukkan diri sebagai partai politik modern yang menjalankan prinsip keterbukaan dalam rekrutmen anggota. Warna demokrasi yang juga menonjol adalah pluralisme. Di dalam tubuh PDI perjuangan, kita seolah diperkenalkan dengan miniatur masyarakat Indonesia, yaitu kebhinekaan baik dari segi suku, agama, etnis dan juga status sosial-ekonomi, di samping itu, sebagai partai pluralis PDI perjuangan perlu memperhatikan efektifitas warna pluralisme yang dimilikinya, karena kelemahan partai-partai pluralis biasanya terletak pada rentannya kohesivitas baik ditingkat elite maupun massa pendukung partai. Sehingga mudah disusupi oleh unsur-unsur eksternal yang berkepentingan untuk memecah dan melemahkan partai (Pareira, 1999: 68).

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir digunakan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka berpikir dalam

penelitian implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dapat digambarkan dengan alur di bawah ini sebagai berikut.



**Bagan 1.** Kerangka berpikir penelitian implementasi rekrutmen politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan berperan sebagai pelaksana rekrutmen politik di tingkat Kabupaten Semarang. Pelaksanaan rekrutmen politik didasarkan pada peraturan perundang-undangan, AD/ART

partai, serta Surat Keputusan DPP PDI perjuangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan rekrutmen politik. PDI Perjuangan merekrut anggota, kader dan pengurus partai untuk kelestarian internal partai, untuk kemudian dilakukan kaderisasi dan seleksi kepemimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM partai yang nantinya akan dicalonkan dan diperjuangkan dalam pemilihan umum, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Semakin banyak anggota partai yang dapat menduduki jabatan politik menjadi indikator implementasi rekrutmen politik oleh partai berhasil.

Pelaksanaan rekrutmen politik tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat baik intern maupun ekstern partai. Partai politik perlu melakukan upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi hambatan yang ada. Apabila upaya yang dilakukan partai berhasil dan diperkuat dengan faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik, maka partai akan mendapat dukungan dari rakyat untuk memperoleh suara dalam pemilu, kader partai dapat menduduki jabatan-jabatan politik, anggota partai akan bertambah, serta agenda partai dapat berjalan dengan lancar. Apabila upaya gagal dilakukan, maka partai akan mengalami kemunduran, dukungan rakyat tidak ada, anggota berkurang, dan sulit menempatkan kadernya dalam jabatan strategis dalam pemerintahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Moleong (2010:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan menggunakan metodologi kualitatif pada penelitian ini adalah agar peneliti dapat mendeskripsikan mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang. Hal ini sesuai dengan pengertian metodologi kualitatif menurut Bongdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dipilih supaya penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dapat dideskripsikan secara mendalam dan luas berdasarkan pengalaman peneliti dari penelitiannya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian ini diadakan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 01 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan bahwa di tingkat Kabupaten Semarang PDI Perjuangan merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2009, memperoleh jumlah kursi terbanyak pada anggota DPRD, serta sebagai partai yang berhasil memenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2010.



### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik.

### **D. Sumber Data Penelitian**

Menurut Arikunto (2006: 129) yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data

tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Moleong, 2010:157).

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi dua yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer dapat disebut juga data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya (Moleong, 2010:157). Untuk penelitian ini, sumber data yang dijadikan sebagai data primer adalah data berupa hasil wawancara yang didapat peneliti dari Informan.

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2010:132). Informan dalam penelitian ini adalah ketua DPC, wakil ketua bidang (wakabid) internal yang bertugas menangani masalah internal partai dalam bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, serta anggota/kader PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yang dipilih secara acak oleh peneliti.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Sumber data yang dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini

adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan surat kabar yang terkait dengan materi partai politik, rekrutmen politik, PDI-Perjuangan, AD/ART PDI Perjuangan, SK-SK PDI Perjuangan, serta arsip dan dokumen-dokumen lain yang mendukung.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Suatu penelitian memerlukan suatu metode yang tepat dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, tujuannya adalah agar data yang diperoleh peneliti itu tepat dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Menurut Moleong (2010: 9) mengenai karakteristik penelitian kualitatif menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut.

#### **1. Wawancara;**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010:186). Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2010:190-191) metode wawancara memiliki bentuk, diantaranya adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan disusun sebelumnya dan di dasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Ciriya kurang diinterupsi dan aebitrer. wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Pertanyaannya biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan.

Melihat wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur yang dikemukakan di atas, pelaksanaan penelitian ini digunakan metode wawancara terstruktur, dimana peneliti sebagai pewawancara menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilakukan wawancara. pewawancara juga menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan pada terwawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan sebagai berikut.

- a. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yaitu H. Bambang Kusriyanto, B.Sc.,



- b. Wakabid internal yang bertugas menangani masalah internal partai dalam bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen, yaitu Koes Pujiharto;
- c. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yaitu Bondan Marutohening, dan
- d. Tejo Wahono dari unsur kader PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

Wawancara dengan beberapa informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang baik rekrutmen anggota, pengurus DPC, calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam rekrutmen politik.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, prasasti, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa dokumen seperti data keanggotaan PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, data nama-nama yang mendaftarkan diri untuk mengikuti penjurangan calon anggota legislatif, serta data nama-nama mendaftarkan diri untuk mengikuti penjurangan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

## F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (Moleong, 2010:324).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam derajat kepercayaan perlu adanya teknik pemeriksaan, antar lain dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan (Moleong, 2010:327). Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Denzin dalam Moleong (2010: 330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Menurut Patton dalam Moleong (2010: 331), teknik triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Teknik triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara;

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah; dan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dari semua informan, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Dengan menggunakannya dua teknik triangulasi ini, maka diperoleh hasil penelitian mengenai implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang, serta memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

#### **G. Metode Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dilakukan suatu analisis data dengan maksud untuk mengolah data yang ada. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:248)

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2010:280).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu (Moleong, 2010:247).

## H. Prosedur Penelitian

Melalui prosedur ini penelitian diharapkan menjadi lebih terstruktur dan terkonsep, sehingga ini akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian sampai pada pengambilan kesimpulan. Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini ada lima tahap, yaitu sebagai berikut.

### 1. Tahap pembuatan rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti membuat rancangan yang akan digunakan dalam penelitian di lapangan. Rancangan penelitian dalam hal ini dibuat dalam bentuk proposal penelitian yang memuat latar belakang penelitian, landasan teori, dan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

### 2. Tahap persiapan penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan yang berkaitan dengan penelitiannya. Peneliti mengajukan proposal yang telah dibuat, mengurus perizinan tempat penelitian dan mengajukan instrumen penelitian.

### 3. Tahap pelaksanaan penelitian

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitiannya baik berupa data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari responden, informan, dan dokumen. Data-data yang diperoleh tersebut nantinya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga dapat menarik kesimpulan yang akurat dan jelas terhadap objek yang menjadi fokus penelitian.

#### 4. Tahap mengolah data penelitian

Pada tahap ini, seluruh hasil pelaksanaan penelitian yaitu yang berupa data-data diolah dengan analisis data untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sebelum melakukan penyimpulan, data perlu dievaluasi sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan penelitian ini dan apabila masih ada kekurangan-kekurangan dapat segera melengkapinya.

#### 5. Tahap penyusunan laporan

Kegiatan penelitian menuntut agar hasilnya disusun, ditulis dalam bentuk laporan penelitian agar hasilnya diketahui orang lain, serta prosedurnya pun diketahui orang lain pula sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan penelitian tersebut (Arikunto, 2006:27).

Dalam penyusunan laporan ini, hasil penelitian disusun dan ditulis secara sistematis dan mengacu pada tata cara penulisan laporan agar laporan bisa diketahui oleh orang lain. Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. kemampuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi seorang peneliti (Moleong, 2010:348).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Deskripsi Objek Penelitian

###### a. Profil Singkat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sudah ada sejak partai politik ini bernama PDI. Awal kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang diketuai oleh Sri Rahayu, dan beberapa tokoh yang ikut memperjuangkan perkembangan PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang antara lain Siswanto, Herintoko, Sunandar, Sukimto, dan Harjo Parman.

Alamat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang adalah Jalan Soekarno-Hatta Nomor 01 Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Sesuai SK DPP PDI Perjuangan Nomor 04.23-A/TAP-DPC/DPP/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010 Tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, terdapat 15 pengurus DPC. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang masa bakti 2010-2015 adalah H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, beliau sekarang juga menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Semarang masa bakti 2009-2014.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang memiliki 19 Pengurus Anak Cabang (PAC) yang tersebar pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Semarang, diantaranya yaitu PAC Kecamatan Ungaran

Barat, Ungaran Timur, Pringapus, Bawen, Suruh, Susukan, Tuntang, Banyubiru, Ambarawa, Getasan, Bancak, Bandungan, Sumowono, Pabelan, Bringin, Bergas, Tengaran, Kaliwungu, dan Jambu. Terdapat pula 261 Pengurus Ranting yang tersebar pada kelurahan/desa di Kabupaten Semarang.

b. Visi PDI Perjuangan

Visi partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai. Berdasarkan amanat pasal 6 Anggaran Dasar partai, visi PDI Perjuangan adalah:

- 1) Terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Terwujudnya masyarakat Pancasila 1 juni 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

c. Misi PDI Perjuangan

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 8, dan 9 Anggaran Dasar Partai, yaitu:

- 1) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.



- 2) Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara.
- 3) Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- 4) Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- 5) Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
- 6) Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- 7) Membentuk dan membangun karakter bangsa.
- 8) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 9) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
- 10) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam NKRI.
- 11) Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- 12) Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

- 13) Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara, agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

d. Organisasi Sayap PDI Perjuangan

Organisasi sayap adalah organisasi yang se-azas dan seaspirasi dengan PDI Perjuangan. Organisasi sayap tersebut antara lain adalah:

1. Banteng Muda Indonesia segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 034/TAP/DPP/XII/2006.
2. Baitul Muslimin Indonesia segmen Ulama dan tokoh agama Islam berdasarkan Surat Masuk Nomor: 1294/IN/DPP/IV/2007.
3. Taruna Merah Putih segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 056/TAP/DPP/IV/2008.
4. Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Perjuangan segmen Mahasiswa dan Pelajar.

e. Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Berdasarkan Surat Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor 04.23-A/TAP-DPC/DPP/XII/2010 tentang Penyempurnaan Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang masa bakti 2010-2015, terdapat 15 pengurus DPC, yaitu dapat dilihat dari tabel 3 dibawah ini sebagai berikut.

**Tabel 3** Struktur Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang Masa Bakti 2010-2015

No	Nama	Jabatan
1	H. Bambang Kusriyanto, B.Sc	Ketua
2	The Hok Hiong	Wakabid Kehormatan Partai, Politik dan Hubungan Antar Lembaga
3	Koes Pujiharto	Wakabid Organisasi, Keanggotaan, Kaderisasi, dan Rekrutmen
4	Eko Herry Subeno	Wakabid Informasi dan Komunikasi
5	Bambang Dwi Nursetyono, B.Sc	Wakabid Sumber Daya dan Dana
6	Supriyadi, SH	Wakabid Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Industri dan Perdagangan, Pengusaha Kecil-Menengah, dan Koperasi
7	Hj. Zuriah, SE	Wakabid Kesehatan, Perempuan, dan Anak
8	Agus Budiyo	Wakabid Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan, Pemuda dan Olah Raga
9	Drs. Pudjo Pramujito	Wakabid Transportasi, Infrastruktur, dan Perumahan, Energi, Pertambangan, dan Lingkungan Hidup
10	Daryatno, SH	Wakabid Hukum, HAM dan Perundang-undangan
11	Bondan Marutohening	Sekretaris
12	Mangdalena Dany Sumarlin, S.Sos	Wakil Sekretaris Bidang Internal
13	Suwartono	Wakil Sekretaris Bidang Program
14	Ngesti Nugraha, SH	Bendahara
15	Dra. Enandi Karanawati	Wakil Bendahara

Sumber: Data dan Arsip DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang.

f. Ruang Lingkup Kerja Departemen Keanggotaan dan Organisasi

- 1) mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis model-model organisasi partai modern, dinamika dan perkembangannya;
- 2) menyusun dan mengkaji sistem rekrutmen anggota baru dengan target-target periodik di semua tingkatan;
- 3) menyusun sistem data base anggota partai yang meliputi jumlah, kualitas, potensi kader dan anggota partai serta kecenderungan perkembangan keanggotaan partai;
- 4) mengumpulkan data dan informasi tentang kader partai lengkap dengan rekam jejaknya;
- 5) mengusulkan skala prioritas program partai sesuai dengan hasil analisa data base anggota partai;
- 6) menyusun konsep manajemen dan sistem organisasi partai menuju partai modern;
- 7) melakukan kajian atas manajemen dan dinamika organisasi partai secara berkesinambungan; dan
- 8) dalam menjalankan tugas dan fungsinya departemen ini berkoordinasi dengan Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya.

g. Ruang Lingkup Kerja Departemen Ideologi dan Kaderisasi

- 1) melakukan pemetaan terhadap ideologi-ideologi besar di dunia, perkembangan dan pengaruh aktualnya;

- 2) melakukan analisa ideologi terhadap kebijakan politik partai berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;
- 3) mengkaji dan merumuskan kontekstualisasi ideologi partai dan ideologi-ideologi lainnya terhadap situasi politik internasional, nasional dan lokal;
- 4) mengkaji konsep-konsep kaderisasi pada partai-partai lain;
- 5) melakukan evaluasi atas pelaksanaan kaderisasi partai; dan
- 6) dalam menjalankan tugas dan fungsinya departemen ini berkoordinasi dengan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi dan bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya.

## **2. Pelaksanaan Rekrutmen Politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

### **a. Rekrutmen Anggota dan Kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Keanggotaan PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang berasal dari anggota PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Selain anggota lama yang berasal dari anggota PDI, PDI Perjuangan juga melakukan rekrutmen terhadap masyarakat untuk menjadi anggota baru. Keanggotataan PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sampai tahun 2009, berdasarkan data KTA nisasi DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Semarang adalah berjumlah sekitar 14.149 anggota dari 19 PAC di Kabupaten Semarang.

Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan tentunya memiliki landasan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan wakil ketua bidang organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen masa bakti 2010-2015 yaitu Koes Pujiharto, landasan hukum rekrutmen anggota dan kader adalah sebagai berikut.

“Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan SK Nomor 101/KPTS/DPP/I/2007 tentang Sistem Penerimaan Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (wawancara, 27 April 2011).

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru menjadi tanggungjawab bersama seluruh anggota PDI Perjuangan, hal ini sesuai hasil wawancara dengan Koes Pujiharto sebagai berikut.

“Seluruh elemen partai struktural, kader dan simpatisan yang di koordinir oleh DPC terlibat dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru. Ketua DPC sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen anggota baru akan melaksanakan agenda rapat di berbagai tingkatan, seperti dalam forum rakercab dan rakerancab. Dalam ajang konsolidasi tersebut diberikan pemahaman, diskusi, intruksi terhadap semua kader dan simpatisan dalam hal pelaksanaan rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan” (wawancara, 27 April 2011).

Cara yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam merekrut anggota baru lebih bersifat ajakan persuasi, sebagaimana dikemukakan oleh sekretaris DPC PDI Perjuangan, Bondan Marutohening sebagai berikut.

“PDI Perjuangan melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara persuasif, kita tidak ada *brain washing* atau cuci otak, apa lagi uang serta paksaan. Yang kita jual pada masyarakat adalah ideologi dan program partai. PDI Perjuangan berusaha menunjukkan konsisten terhadap ideologi partai serta konsisten pula dalam membuat dan menjalankan program partai. Disitulah masyarakat sendiri yang akan menilai apakah PDIP layak untuk dijadikan partainya atau tidak” (wawancara, 21 Mei 2011).

Pelaksanaan perekrutan anggota baru diawali dengan adanya sosialisasi partai kepada masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan Koes Pujiharto sebagai berikut.

“Rekrutmen anggota baru partai merupakan keberhasilan dari sosialisasi partai. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai apa saja yang ada di PDIP bisa melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka *website* PDI Perjuangan yang dapat diakses di [www.pdi-perjuangan.org](http://www.pdi-perjuangan.org). Berkaitan dengan rekrutmen anggota, salah satu sosialisasi difokuskan terhadap kinerja partai dalam kehidupan masyarakat. Jika kinerja partai dinilai baik oleh masyarakat, maka masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk mendukung bahkan masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi menjadi anggota PDIP adalah kesadaran masyarakat” (wawancara, 21 Mei 2011).

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan mendapat perhatian dari masyarakat. Ada beberapa upaya PDI Perjuangan dalam mendekati masyarakat sesuai dikemukakan oleh Koes Pujiharto sebagai berikut.

“Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang variatif tergantung pada kondisi masyarakat dan wilayahnya. Sebagai contohnya PDI Perjuangan melakukan pengobatan massal gratis bagi masyarakat, serta membantu pembangunan jalan desa dan gapura untuk beberapa desa yang berhasil memperoleh suara yang signifikan dalam kemenangan PDIP dalam Pemilu.” (wawancara, 21 Mei 2011).

Sosialisasi kepada masyarakat oleh PDI Perjuangan lebih terasa ketika menjelang Pemilu. Sosialisasi ini mempunyai tujuan mendapat

dukungan masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Berikut ini pemaparan dari Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan mengenai salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan.

“Menjelang pemilu, biasanya seluruh kader diintruksikan untuk mendekati masyarakat sehingga mendapat dukungan suara. Caranya bermacam-macam tergantung masyarakatnya. Kalau yang saya lakukan sebagai kader PDIP di wilayah saya, salah satunya dengan mendekati pemuda lewat karang taruna. Mereka butuh apa ya saya usulkan ke PDIP untuk mendapat tindak lanjut. Contohnya pemuda di desa saya gemar sepak bola, ya kami menyumbang bola dan perbaikan lapangan. Tidak hanya membantu dana saja, tetapi ya saya datang kalau ada rapat-rapat karang taruna. Jika sosialisasi berhasil dengan baik, mungkin warga ada yang berminat mendaftarkan diri ke PDIP, tidak hanya sebagai simpatisan saja atau hanya mencoblos PDIP saja” (wawancara, 17 Juni 2011).

Implementasi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan juga tergantung pada kualitas kader dan tokoh PDI Perjuangan. Jika kader dan tokoh PDI Perjuangan dinilai baik di mata masyarakat, maka masyarakat akan tertarik untuk ikut bergabung dengan PDI Perjuangan, lain halnya jika kader dan tokoh PDI Perjuangan buruk, masyarakat tidak akan tertarik dengan PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan sebagai berikut.

“Sebagai kader, saya harus bisa membaur dengan masyarakat dan menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Contohnya jika ada kerja bakti di lingkungan ya harus ikut. Ada undangan rapat, pengajian ya menghadiri. Kader juga harus aktif di masyarakat. Jadi pandangan masyarakat jika PDIP partainya peminum, atau partai yang kasar dapat diperbaiki dengan sikap terpuji kader-kader PDIP di masyarakat. Selain kader, tokoh-tokoh PDIP ditingkat pusat sampai daerah juga sangat mempengaruhi minat warga. Kalau figur-figur PDIP yang ada di pusat rukun, bekerja dengan baik ya warga akan tertarik masuk



PDIP, lain halnya jika kader PDIP diberitakan di Televisi atau di koran kena kasus ya warga tidak akan tertarik pada PDIP bahkan kecewa terhadap PDIP” (wawancara, 17 Juni 2011).

Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 10 menyebutkan bahwa anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan anggota. Mengenai persyaratan anggota partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut:

- 1) WNI yang telah berumur 17 tahun dan atau sudah menikah;
- 2) menyetujui dan menaati Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan partai;
- 3) bersedia menaati dan menegakkan disiplin partai; dan
- 4) bersedia mengikuti kegiatan partai.

Bambang Kusriyanto sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, dalam wawancara dengan peneliti memaparkan tahapan untuk menjadi anggota PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

“Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diusulkan untuk diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai” (wawancara, 25 April 2011).

Sebelum mendapatkan KTA, calon anggota partai harus melalui masa pembinaan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris DPC PDI Perjuangan, Bondan Marutohening sebagai berikut.

“Masa pembinaan dilakukan selama 6 bulan dengan cara pengurus partai setempat memantau aktivitas calon anggota baru tersebut, apakah mereka taat dengan garis partai. selama 6 bulan itu, setiap anggota diharuskan merekrut sekurangnya 1 (satu)

anggota baru. Individu yang telah mendaftar, saat mengembalikan formulir pendaftaran akan mendapat materi tentang seluk beluk PDI Perjuangan, AD/ART dan sharing langsung dengan kader/pengurus partai dijenjang struktural ia mendaftarkan diri” (wawancara, 21 Mei 2011).

Pada masa pembinaan, calon anggota dinilai apakah layak menjadi anggota PDIP atau tidak. Jika pernah menjadi anggota partai lain, maka harus dapat menunjukkan surat pengunduran diri dari partai lain tersebut. Setelah itu, DPC melakukan rapat penetapan calon anggota, DPC mempertimbangkan antara syarat administratif dengan hasil penilaian selama masa pembinaan. Jika rapat DPC partai memutuskan calon anggota diterima sebagai anggota PDIP, maka sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/janji anggota. Pengesahan anggota partai diputuskan oleh DPC, barulah anggota akan mendapatkan KTA dan ditulis dalam buku induk anggota.

Contoh Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan dapat dilihat dibawah ini.

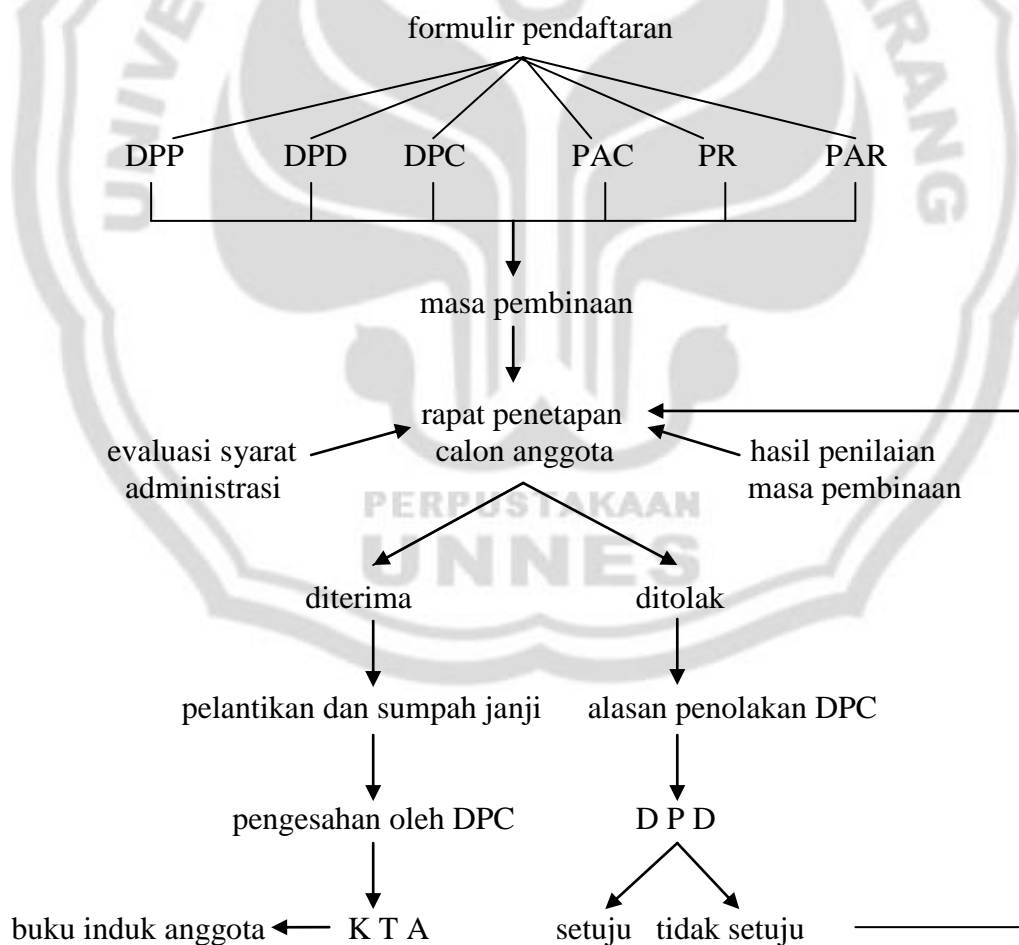


Gambar 1. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak dari depan



Gambar 2. Contoh KTA PDI Perjuangan tampak dari belakang

Mekanisme implementasi rekrutmen anggota PDI Perjuangan dapat digambarkan melalui bagan dibawah ini.



Bagan 2. Mekanisme penerimaan anggota baru

Anggota PDI Perjuangan untuk kemudian dapat dipilih menjadi kader partai. Ketentuan mengenai syarat anggota untuk menjadi kader diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PDI Perjuangan pasal 3. Mengenai kader PDI Perjuangan, wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen, Koes Pujiharto menjelaskan sebagai berikut.

“Bahwa kader partai adalah anggota yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada partai serta kepada masyarakat. Kader partai dalam konteks ini adalah kader PDI Perjuangan harus anggota yang berkelakuan tidak tercela dan telah berjasa kepada PDIP” (wawancara, 27 April 2011).

Keanggotaan berakhir apabila menjadi anggota partai politik lain, mengundurkan diri, diberhentikan, dan meninggal dunia sesuai isi Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan pasal 11. Koes Pujiharto juga menjelaskan mengenai keanggotaan partai sebagai berikut.

“Lamanya keanggotaan PDIP tidak dibatasi, selama anggota partai tidak melakukan penyimpangan, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai, maka masih berstatus sebagai anggota PDIP. Penyimpangan tersebut contohnya adalah menjadi anggota parpol lain. Berbagai penyimpangan akan mendapat sanksi dari partai” (wawancara, 27 April 2011).

#### **b. Rekrutmen Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Pengurus merupakan bagian yang penting bagi tubuh suatu organisasi, begitu pula bagi organisasi politik seperti partai politik. Berkembang atau mundurnya partai politik juga ditentukan oleh kualitas pengurus partai yang mengelola partai politik tersebut. Setiap jenjang struktural partai memiliki kepengurusan yang terorganisir. Pengurus PDIP Kabupaten Semarang berasal dari anggota PDI

Perjuangan sendiri, oleh sebab itu perlu dipersiapkan anggota berkualitas untuk reorganisasi kepengurusan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, diperoleh penjelasan mengenai pengurus PDI Perjuangan sebagai berikut.

“Pengurus partai dalam PDI Perjuangan adalah susunan pengurus partai yang dipilih dan ditetapkan dalam forum resmi partai dengan Surat Ketetapan oleh pengurus partai dua tingkat di atasnya berdasarkan rekomendasi dari pengurus partai satu tingkat di atasnya, kecuali untuk pengurus DPC dan DPD partai ditetapkan dengan SK DPP partai” (wawancara, 25 April 2011).

Selanjutnya Koes Pujiharto, menjelaskan mengenai perekrutan pengurus DPC PDIP Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Pergantian pengurus di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dilaksanakan setiap lima tahun sekali melalui Konfercab. Konfercab dilaksanakan setelah kongres partai dan Konferda. Pelaksanaannya mengacu pada SK No 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III PDI Perjuangan” (wawancara, 27 April 2011).

Pelaksanaan Konfercab berlandaskan pada Anggaran Dasar partai pada pasal 69, bahwa Konfercab mempunyai wewenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban DPC partai, merumuskan kegiatan partai di kabupaten/kota bersangkutan, dan memilih DPC partai yang melaksanakan tugas dan fungsi DPP partai di wilayahnya.

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada pasal 12 ayat 2 Konfercab mempunyai beberapa

kewenangan salah satunya adalah memilih DPC partai dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) DPC yang memiliki PAC kurang dari 5, maka jumlah pengurusnya ditetapkan sebanyak 11 orang.
- 2) DPC yang memiliki PAC lebih dari 5 s/d 10 maka jumlah pengurusnya ditetapkan sebanyak 13 orang.
- 3) DPC yang memiliki PAC lebih dari 10, maka jumlah pengurusnya ditetapkan sebanyak 15 orang.
- 4) DPC yang memiliki PAC kurang dari 10, namun populasi penduduknya di kabupaten/kota tersebut lebih dari 500.000 orang, maka jumlah pengurusnya boleh 15 orang.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mempunyai 19 PAC sehingga dalam pembentukan pengurus DPC berjumlah 15 orang. Sesuai pasal 37 Anggaran Dasar (AD) PDI Perjuangan bahwa pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang terdiri dari ketua, wakabid internal, wakabid program, sekretaris dan wakil-wakil sekretaris, serta bendahara dan wakil-wakil bendahara.

Syarat yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPC berdasarkan pasal 21 SK Nomor 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III PDI Perjuangan adalah sebagai berikut.

- 1) anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun terus menerus menjadi anggota, dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.
- 2) pernah menjadi pengurus partai dan/atau alat kelengkapan partai yang berperilaku tidak tercela.
- 3) berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) kecuali dari nomor 1, 2, dan 3 harus mendapatkan persetujuan DPP partai.

Cara perekrutan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dimulai dengan memilih ketua DPC. Sedangkan yang dapat dipilih sebagai ketua DPC adalah calon ketua yang namanya diusulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat pengurus anak cabang. Rapat PAC mempunyai wewenang mengusulkan 1 (satu) nama calon ketua DPC partai dimana PAC yang bersangkutan berada, yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan partai.

Jika ketua DPC telah terpilih, maka ketua terpilih menjadi ketua formatur yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyusun kepengurusan DPC dibantu oleh anggota formatur yang dipilih dari dan oleh utusan konferensi cabang partai. Utusan konfercab terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara Pengurus Anak Cabang (PAC) partai definitif yang ditetapkan dalam rapat pengurus anak cabang PDI Perjuangan. Kepengurusan DPC yang telah dibuat kemudian ditetapkan dalam SK DPP PDI Perjuangan.

**c. Kaderisasi Anggota, Kader dan Pengurus DPC PDI Perjuangan  
Kabupaten Semarang**

Selain merekrut anggota, kader dan pengurus partai, juga perlu dikembangkan sistem pelatihan, pendidikan dan kaderisasi kepada anggota partai, menurut Koes Pujiharto wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen dari hasil wawancara peneliti mengenai kaderisasi adalah sebagai berikut.

“Kaderisasi dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk mentransfer pengetahuan politik yang terkait dengan ideologi, sejarah, misi, visi, dan strategi politik PDI Perjuangan, selain itu juga hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, bangsa dan negara. Kaderisasi PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dilaksanakan tidak hanya ada pada tingkat DPC saja, melainkan pengurus DPC mendapatkan pendidikan dan kaderisasi dari DPD, DPP, maupun dari pemerintah. Pengurus DPC yang sudah dikader, untuk kemudian melakukan kaderisasi pada anggota-anggotanya yang ada pada tingkat DPC dan tingkatan dibawahnya seperti PAC, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting” (wawancara, 27 April 2011).

Proses kaderisasi dan pendidikan politik di DPC menjadi wewenang dan lingkup kerja dari wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen, tetapi dalam pelaksanaan pengkaderan anggota, baik anggota lama maupun anggota baru PDI Perjuangan bekerja sama dengan bidang-bidang yang lain. Hal tersebut dilakukan untuk kesuksesan bersama, oleh karena itu proses rekrutmen yang didalamnya terdapat kaderisasi menjadi tanggung jawab bersama.

Kurun waktu kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan terhadap anggota, kader dan pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dipaparkan oleh Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan sebagai berikut.



“Pengkaderan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yaitu melalui pelatihan dan pendidikan kader sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan penempatan kader. Namun akhir-akhir ini pengkaderan oleh DPC PDI Perjuangan macet pelaksanaannya. Mungkin karena masih banyak agenda yang lain” (wawancara, 17 Juni 2011).

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto menjelaskan perlunya seleksi kepemimpinan dan kaderisasi oleh PDI Perjuangan terhadap anggota partai adalah sebagai berikut.

“Seleksi dan kaderisasi dalam PDI Perjuangan diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas, seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan pemantapan ideologi partai, sosialisasi sikap politik dan pemahaman organisasi politik kepada struktur partai maupun kader partai setiap setahun satu kali. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader (KGK), seminar, diklat kader PDI Perjuangan dan dialog publik” (wawancara, 25 April 2011).

Sosialisasi sikap politik PDI Perjuangan perlu dilakukan agar dapat tercapai bersama. Sikap politik PDI Perjuangan yang dimaksud pada wawancara dengan ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto diatas dapat dilihat dalam SK Nomor 07/TAP/KONGRES III/PDIP/2010 tentang sikap politik PDI Perjuangan sebagai berikut.

- 1) memperkuat sistem hukum dan membangun budaya hukum;
- 2) pemberantasan korupsi;
- 3) pemberantasan mafia peradilan;
- 4) pemberantasan penebangan, perikanan dan penambangan liar;

- 5) pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;
- 6) penegakkan hukum lingkungan;
- 7) pemberantasan narkoba dan psikotropika;
- 8) kepastian hukum hak kepemilikan tanah;
- 9) perlindungan anak, perempuan dan masyarakat termarjinal; dan
- 10) penghormatan HAM.

**d. Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juga mencakup rekrutmen terhadap bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua DPC PDIP Kabupaten Semarang, H. Bambang Kusriyanto, B.Sc, bahwa:

“PDI Perjuangan bertanggung jawab dan berkewajiban mengajukan kader-kader partai yang terbaik, serta memiliki disiplin yang tinggi untuk dipilih sebagai perwakilan partai dilembaga legislatif. Dimaksudkan untuk memperlancar proses penentuan kader-kader partai yang terbaik tersebut, maka diperlukan seleksi dengan cara penjaringan, penyaringan dan penetapan calon legislatif sesuai SK DPP PDI Perjuangan” (wawancara, 25 April 2011).

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif oleh DPC berdasarkan Surat Keputusan Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan

Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan. DPC partai berwenang menetapkan sebanyak-banyaknya 30% calon anggota DPR RI, sebanyak-banyaknya 40% calon anggota DPRD provinsi, dan 50% calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan kuota (jumlah kursi) pada masing-masing kabupaten/kota atau daerah pemilihan (Dapil). Anggota partai hanya boleh mendaftarkan diri sebagai salah satu calon legislatif di satu Dapil. Daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Semarang pada pemilu legislatif 2009 terdiri dari:

- 1) Dapil 1 meliputi Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur, dan Bergas;
- 2) Dapil 2 meliputi Kecamatan Tuntang, Bawen, dan Pringapus;
- 3) Dapil 3 meliputi Kecamatan Banyubiru, Jambu, Sumowono, Ambarawa, dan Bandungan;
- 4) Dapil 4 meliputi Kecamatan Suruh, Pabelan, Bringin, dan Bancak;
- 5) Dapil 5 meliputi Kecamatan Getasan, Tengar, Susukan, dan Kaliwungu.

Pelaksanaan rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai SK Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 dibagi dalam tahap Penjaringan, Penyaringan, dan Penetapan. Ketiga tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Tahap Penjaringan

Penjaringan adalah bagian dari proses rekrutmen calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan atau DPR RI

oleh struktural partai di masing-masing tingkatan struktural partai. Setiap anggota partai berhak untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota melalui struktural partai pada masing-masing tingkatan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh perundang-undangan dan peraturan partai.

Persyaratan bagi setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 pasal 50, yaitu sebagai berikut.

- a) WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih.
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) bertempat tinggal di wilayah NKRI.
- d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainnya yang sederajat.
- f) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi 1945.
- g) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

- h) sehat jasmani dan rohani.
- i) terdaftar sebagai pemilih.
- j) bersedia bekerja penuh waktu.
- k) mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- l) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m) bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n) menjadi anggota partai politik peserta pemilu
- o) dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan

p) dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Untuk kelengkapan administrasi bakal calon perlu dibuktikan dengan syarat-syarat berikut ini:

- a) kartu tanda penduduk WNI
- b) bukti kelulusan berupa fotocopy ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri setempat.
- d) surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani.
- e) surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f) surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup
- g) surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokasi/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani kertas bermaterai cukup.

- h) surat pernyataan tentang kesediaan untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-pejabat lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- i) Kartu Tanda Anggota partai politik peserta pemilu.
- j) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- k) surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.

Selain harus memenuhi persyaratan dari perundang-undangan, setiap bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan internal partai yaitu sebagai berikut.

- a) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945.
- b) tidak terlibat kongres PDI di Medan/kongres PDI di Palu/kongres Palu.
- c) tidak melakukan penolakan terhadap hasil-hasil keputusan kongres II PDI perjuangan, Bali tahun 2005.
- d) mengisi formulir daftar riwayat hidup yang disediakan oleh DPP partai.

- e) mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang disediakan oleh DPP partai.
- f) mengisi formulir persyaratan administratif lainnya yang disediakan oleh DPP partai.
- g) bagi anggota partai yang keanggotaannya kurang dari 1 tahun, wajib merekrut anggota baru sedikitnya 100 anggota, yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA).

Tahap penjaringan sebagaimana dijelaskan oleh wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen, Koes Pujiharto dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Anggota partai yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen di struktur partai tempat yang bersangkutan mendaftar, kemudian berhak mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai yang bersangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran Caleg sebesar Rp 500.000,00. Biaya tersebut masuk ke DPC diluar dana kampanye calon anggota legislatif” (wawancara, 27 April 2011).

Nama-nama bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR RI, yang terjaring dimasing-masing tingkatan seluruhnya dibawa kedalam rapat kerja cabang kusus (Rakercabsus) partai.

## 2) Tahap Penyaringan

Penyaringan adalah bagian dari proses seleksi nama-nama calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan/atau DPR



RI sampai dengan penetapan nomor urut calon anggota. DPC partai wajib menyelenggarakan Rakercabsus partai untuk:

- a) menentukan sedikitnya 1 (satu) calon anggota DPR RI;
- b) menentukan calon anggota DPRD provinsi, sedikitnya 1 (satu) kali kuota (jumlah kursi) anggota DPRD provinsi pada masing-masing kabupaten/kota disampaikan kepada DPD partai untuk dibawa kedalam Rakerdasus partai;
- c) menentukan calon anggota DPRD kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali kuota (jumlah kursi) pada masing-masing kabupaten kota;
- d) membentuk tim verifikasi sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing; dan
- e) tim verifikasi sebagaimana dimaksud di atas beranggotakan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari unsur DPC dan unsur PAC dengan perimbangan 3 (tiga) berbanding 2 (dua).

Kriteria anggota tim verifikasi sesuai SK Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 pasal 24 adalah sebagai berikut.

- a) menjadi pengurus harian partai dengan penetapan sesuai dengan peraturan partai;
- b) menjadi anggota partai sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terus menerus;
- c) tidak sedang mendapatkan sanksi karena pelanggaran disiplin partai partai sebagaimana dimaksudkan di dalam AD-ART partai;

- d) tidak sedang menjalani penyidikan oleh aparat penegak hukum karena penyalahgunaan keuangan partai, tersangkut kasus narkoba dan psikotropika dan/ atau pelanggaran hukum karena tindak pidana kejahatan;
- e) tidak rangkap jabatan sebagai pengurus struktural dengan anggota DPRD provinsi dan atau DPRD kabupaten/kota.
- f) mendapat mandat dari struktural partai ditingkatnya untuk menjadi anggota tim verifikasi; dan
- g) tim verifikasi bertanggung jawab kepada rapat kepada rapat kerja khusus sesuai tingkatannya.

Tahap penyaringan sebagaimana dijelaskan oleh wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen Koes Pujiharto dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon legislatif” (wawancara, 27 April 2011).

Hasil tim verifikasi terhadap nilai bobot calon dilaporkan kepada struktur partai yang satu tingkat lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Tahap penyaringan dilakukan untuk menentukan 120% dari alokasi kursi di setiap daerah pemilihan

untuk calon anggota legislatif dilakukan berturut-turut oleh DPC partai, DPD partai dan DPP partai dalam rapat PDI Perjuangan.

### 3) Tahap Penetapan

Penetapan nomor urut adalah menetapkan nomor urut calon yang akan diajukan oleh partai yang diputuskan melalui rapat struktur partai pada tingkatannya. Tahap penetapan dilakukan setelah tim verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi persyaratan, kebenaran pengisian formulir rekrutmen serta kebenaran data pendukung bukti diri Caleg pada tahap penyaringan. Penetapan nomor urut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagai berikut.

- a) jabatan calon di struktur partai;
- b) nilai bobot calon;
- c) penugasan calon oleh struktur partai;
- d) hasil persentase perolehan suara PDIP pada pemilu 2004;
- e) jumlah pemilih dari daerah yang diwakilinya.

Penetapan nomor urut didasarkan pada jabatan calon di struktur partai memiliki ketentuan sebagai berikut.

- a) Ketua umum dan sekretaris jendral partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPR RI;

- b) Ketua dan sekretaris DPD partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD provinsi;
- c) Ketua, sekretaris DPC, dan ketua PAC partai memiliki prioritas untuk ditetapkan menjadi calon dengan nomor urut utama DPRD kabupaten/kota.

Bakal calon yang memiliki bobot nilai yang lebih tinggi, berhak ditempatkan pada nomor urut dibawah yang disebutkan diatas. Nilai bobot dihitung berdasarkan data pendukung calon. Bila dalam suatu daerah pemilihan dijumpai adanya calon yang mempunyai nilai bobot sama, maka prioritas nomor urut diberikan kepada calon yang berasal dari daerah yang memperoleh suara yang lebih besar dalam pemilu 2004, jumlah pemilih yang lebih banyak atau adanya penugasan calon oleh struktur partai.

Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan dan pelanggaran rekrutmen calon legislatif dalam pemilu tahun 2009, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Koes Pujiharto sebagai berikut.

“Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan dan penyaringan calon legislatif bersifat mengikat, dan harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh struktur partai pada semua tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui SK. Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan di dalam seluruh proses, baik tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan nomor urut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD-ART partai serta peraturan disiplin organisasi partai agar tercipta ketertiban bukan kecurangan-kecurangan pada intern partai” (wawancara, 27 April 2011).

**e. Rekrutmen Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Semarang oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik antara lain juga mencakup rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah bupati dan wakil bupati.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen, Koes Pujiharto mengatakan pedoman pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil bupati Kabupaten Semarang sebagai berikut.

“Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil bupati Kabupaten Semarang dalam pilkada 2010 yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang berdasarkan SK Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009. Tetapi pada saat ini, sudah ada SK baru sebagai bentuk penyempurnaan dari Surat Ketetapan Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009, yaitu Surat Ketetapan Nomor 031/KPTS/DPP/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi PDI Perjuangan. Penyempurnaan SK ini dibuat atas dasar evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen Cabup/Cawabup di beberapa daerah yang telah melaksanakan pemilikada, ditemukan kendala internal maupun eksternal partai. Dengan dikeluarkannya SK Nomor 031/KPTS/DPP/III/2011 sebagai bentuk revisi dari SK Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009, maka pelaksanaan rekrutmen cabup/cawabup yang dilaksanakan PDI Perjuangan sekarang harus mengacu pada SK terbaru tersebut sebelum ada penyempurnaan lagi” (wawancara, 27 April 2011).

Berdasarkan SK Nomor 031/KPTS/DPP/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi PDI Perjuangan, pelaksanaan rekrutmen bakal calon bupati dan/atau wakil bupati melalui tahap penjaringan dan tahap penyaringan.

1) Tahap penjaringan

Tahap penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPC PDIP Kabupaten Semarang, menurut hasil wawancara dengan Koes Pujiharto adalah sebagai berikut.

“Penjaringan dilakukan untuk menampung aspirasi dari internal partai yang dilakukan oleh DPC PDIP untuk menghimpun nama-nama bakal calon bupati/wakil bupati berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku” (wawancara, 27 April 2011).

Penjaringan bakal calon tingkat kabupaten/kota dilaksanakan sekurang-kurangnya 8 bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana diputuskan KPU kabupaten/kota dan dilakukan melalui PAC, DPC, DPD dan DPP partai. Bakal calon yang dapat dijamin sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah adalah WNI yang memenuhi syarat sebagai berikut.

- a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada NKRI.

- c) berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.
- d) berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- e) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- g) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- i) menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l) tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.

- n) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- o) belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- p) tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah; dan
- q) mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Selanjutnya untuk bakal calon dari unsur anggota/kader partai dapat dijaring apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a) anggota/kader partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan KTA;
- b) anggota/kader partai sebagaimana harus menyertakan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus partai tempat yang bersangkutan berdomisili;
- c) tidak sedang terkena sanksi organisasi;
- d) tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “Kongres Medan” dan atau “Kongres Palu”;
- e) tidak menentang hasil Kongres II partai di Denpasar, Bali;
- f) tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
- g) tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi partai;
- h) memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN;



- i) memiliki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis perjuangan partai;
- j) sanggup memberdayakan potensi partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai yang dituangkan dalam suatu program tertulis; dan
- k) dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilihan, antara lain dukungan masyarakat.

Warga masyarakat umum yang bukan berasal dari jajaran partai, yang berkeinginan mencalonkan diri/dicalonkan sebagai bakal calon bupati dan/atau wakil bupati dapat dijangkau dengan kriteria sebagai berikut.

- a) bersedia mengikuti seluruh tahapan penjangkauan dan penyaringan sebagaimana ditentukan dalam pedoman pelaksanaan ini;
- b) yang bersangkutan telah menyatakan komitmen kepada DPP pada suatu program tertulis untuk:
  - i. memperhatikan peran dan aspirasi PDI perjuangan di daerahnya;
  - ii. bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi PDI Perjuangan;
  - iii. senantiasa bersedia bekerjasama dengan jajaran struktural partai di wilayah pemilihan yang bersangkutan.
- c) memiliki visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai;

- d) tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung;
- e) memiliki wawasan nasional;
- f) memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN;
- g) dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilukada, antara lain dari dukungan masyarakat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey yang independen; dan
- h) menyerahkan rencana anggaran pemilukada.

Tahapan penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dijelaskan oleh wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen Koes Pujiharto dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Setiap bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengambil formulir pendaftaran untuk kemudian diisi dan diserahkan kepada DPC PDIP, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung peserta sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan, serta uraian yang berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap PDI Perjuangan. Setelah itu dilakukan verifikasi dalam rapat partai untuk meneliti tentang kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Verifikasi yang dilakukan yaitu mencakup pengalaman kerja, pengabdian pada PDI Perjuangan, ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan Undang-Undang. Hasil verifikasi tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai, untuk kemudian diteruskan ke DPP PDI Perjuangan” (wawancara, 27 April 2011).

Nama-nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Semarang yang sudah diverifikasi, kemudian

dilakukan survey politik oleh konsultan atau lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen dan pemetaan politik dilakukan oleh DPC dan DPD partai. Nama-nama calon yang disurvei diusulkan oleh DPC dan DPD PDI Perjuangan.

## 2) Tahap penyaringan

Tahapan penyaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dijelaskan oleh wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen, Koes Pujiharto dalam wawancara dengan peneliti adalah sebagai berikut.

“Penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu penyaringan tahap pertama yang dilakukan oleh DPD melalui rapat DPD dengan mempertimbangkan soliditas partai, komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik partai, hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon, kekuatan dukungan riil bakal calon untuk memenangkan pemilukada, dan pemetaan politik yang dilakukan DPC dan DPD Partai khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan pemilukada. Nama-nama yang sudah direkomendasikan dilakukan penyaringan tahap kedua oleh DPP PDI Perjuangan guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal partai dan peluang memenangkan Pemilukada di Kabupaten Semarang” (wawancara, 27 April 2011).

Penyaringan tahap pertama dilakukan dengan memanggil bakal calon dalam rapat DPD Partai. DPD Partai sekurang-kurangnya merekomendasikan 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan 2 (dua) bakal calon wakil kepala daerah untuk diusulkan ke DPP Partai. Pasangan calon yang ditetapkan oleh DPP, dikirim kembali ke DPD dan DPC, untuk selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Semarang.

### **3. Faktor yang Mendukung dan Menghambat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam Melaksanakan Rekrutmen Politik**

#### **a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Rekrutmen Politik**

Pelaksanaan rekrutmen politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, baik rekrutmen terhadap anggota atau kader partai, pengurus partai serta calon pemimpin dan wakil rakyat, sebagaimana pemaparan dari ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, dapat berjalan karena beberapa faktor sebagai pendukung pelaksanaan rekrutmen politik itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

“Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen anggota oleh DPC antara lain adanya pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktural partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat dusun atau Rukun Warga (RW). Selain itu, didukung oleh kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang sebagian besar berbasis nasionalis, sesuai dengan basis dari PDI Perjuangan sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Masyarakat Kabupaten Semarang sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan perolehan suara hasil pemilu dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2009 dimenangkan oleh partai basis nasionalis, seperti PDIP dan Golongan Karya,” (wawancara, 25 April 2011).

Dukungan masyarakat Kabupaten Semarang terhadap PDI Perjuangan dapat dilihat dari hasil Pemilu legislatif tahun 2009, bahwa PDI Perjuangan berhasil memperoleh kursi terbanyak yaitu 8 kursi dari 45 kursi DPRD Kabupaten Semarang. Hasil perolehan suara dalam Pemilu pada 2010 Kabupaten Semarang, juga dimenangkan oleh calon yang diusung dan diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Menurut ketua

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto

bahwa:

“Dengan adanya kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan di tingkat Kabupaten Semarang, dengan sendirinya akan mendorong antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PDI Perjuangan terlebih pada individu yang bermaksud mencalonkan diri dalam jabatan politik dengan mengendarai PDI Perjuangan sebagai mesin politik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan pada PDI Perjuangan selama wakil-wakil PDI Perjuangan yang menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD dan yang menjadi pasangan bupati dan/ wakil bupati terpilih dapat membuktikan kinerja dan kredibilitas yang bekerja untuk rakyat dan demi kepentingan rakyat. Masyarakat akan mendukung PDI Perjuangan apabila PDI Perjuangan dapat melahirkan tokoh-tokoh yang berkompeten” (wawancara, 25 April 2011).

Faktor pendukung rekrutmen calon anggota legislatif dikemukakan oleh sekretaris DPC PDI Perjuangan, Bondan Marutohening sebagai berikut.

“Dalam perekrutan dan penjaringan calon anggota legislatif Kabupaten Semarang tidak terlalu kesulitan, karena banyak kader PDI Perjuangan yang berantusias untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sehingga partai tidak perlu merekrut orang di luar keanggotaan PDI Perjuangan untuk dijadikan pengurus partai dan untuk dijaring menjadi calon anggota legislatif” (wawancara, 21 Mei 2011).

Pengorganisasian PDI Perjuangan yang solid dibuktikan dengan struktur partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai dengan tingkat dusun atau rukun warga. Menurut wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen Koes Pujiharto, dari hasil wawancara dengan peneliti, selain basis partai dan pengorganisasian partai, faktor pendukung lain adalah sebagai berikut.

“Adanya organisasi-organisasi sayap PDI Perjuangan seperti Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, Taruna Merah Putih, Komunitas Mahasiswa dan Pelajar yang direkrut dari beberapa kalangan masyarakat dapat membantu memperoleh anggota baru dan memperkuat dukungan terhadap partai menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, serta seleksi kepemimpinan yang cukup baik sehingga dalam menampilkan tokoh-tokoh sebagai pemimpin dan wakil rakyat, PDI Perjuangan tidak kesulitan mencari kader berkualitas yang nantinya akan diperjuangkan dalam pemilu untuk menempati jabatan politik” (wawancara, 27 April 2011).

Organisasi sayap PDI Perjuangan adalah organisasi yang se-azas dan seaspirasi dengan PDI Perjuangan. Organisasi sayap PDI Perjuangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Banteng Muda Indonesia segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 034/TAP/DPP/XII/2006;
- 2) Baitul Muslimin Indonesia segmen Ulama dan tokoh agama Islam berdasarkan Surat Masuk Nomor: 1294/IN/DPP/IV/2007;
- 3) Taruna Merah Putih segmen pemuda dan pemudi berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 056/TAP/DPP/IV/2008, dan
- 4) Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Perjuangan segmen Mahasiswa dan Pelajar.

Faktor pendukung lain juga dikemukakan oleh Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut.

“Faktor yang mendorong warga masyarakat untuk memberi dukungan bahkan sampai menjadi anggota/kader PDI Perjuangan salah satunya karena figur dari tokoh-tokoh PDI Perjuangan seperti figur Bung Karno dan figur Megawati yang masih banyak dikagumi masyarakat. Selain 2 (dua) figur itu, menurut saya kader PDI Perjuangan juga mempengaruhi pilihan

masyarakat. Jika kader-kader PDI Perjuangan berperilaku baik, masyarakat juga akan menilai baik terhadap partai. Seperti saya untuk mengajak teman, tetangga ya saya harus berperilaku baik, dengan begitu dengan sendirinya masyarakat mengikuti langkah saya” (wawancara, 17 Juni 2011).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan, diperoleh informasi tentang beberapa faktor pendorong PDI Perjuangan dalam melaksanakan rekrutmen politik, antara lain adanya struktur organisasi yang kokoh hingga ke tingkat anak ranting, kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang berbasis nasionalis sesuai dengan basis PDI Perjuangan, kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu di tingkat Kabupaten Semarang, adanya organisasi sayap PDI Perjuangan yang dibentuk dari berbagai kalangan sehingga dapat memperluas perolehan anggota, kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan Megawati, serta keaktifan dan perilaku baik kader PDI Perjuangan di masyarakat.

#### **b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rekrutmen Politik**

Pelaksanaan fungsi rekrutmen politik oleh DPC PDI Perjuangan, sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto, tidak terlepas dari berbagai penghambat. Hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

“Adanya pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sebagai partainya kaum marjinal dan daerah basis islam

beranggapan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai sekuler. Selain itu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena beberapa para politikus yang kurang bahkan tidak baik. Hambatan lain adalah SDM dari anggota PDI Perjuangan belum seluruhnya berkualitas, serta dana sebagai penunjang pelaksanaan rekrutmen sendiri masih sering menjadi kendala dalam rekrutmen politik” (wawancara, 25 April 2011).

Dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, seperti maraknya kasus korupsi oleh wakil rakyat membuat krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Masyarakat berpandangan bahwa politik itu kotor, akibatnya mereka tidak mau terlibat dalam dunia politik. Menurut Koes Pujiharto, cara mengatasi persepsi masyarakat yang sedemikian rupa adalah sebagai berikut.

“PDI Perjuangan melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa partai politik berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Selain itu, PDI Perjuangan memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pengurus, anggota, dan kadernya dan masyarakat umum melalui pertemuan, dialog publik maupun mass media. Selain itu, PDI Perjuangan akan berusaha selektif mungkin dalam perekrutan anggota Caleg dan Cabup/Cawabup agar tidak ada utusan dari PDI Perjuangan yang mengecewakan rakyat” (wawancara, 27 April 2011).

Penyebab dari Sumber Daya Manusia (SDM) anggota dan kader PDI Perjuangan belum seluruhnya berkualitas karena faktor pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut.

“Sumber Daya Manusia (SDM) PDI Perjuangan memang belum seluruhnya berkualitas, karena tidak semua kader lulusan Sarjana. Bahkan banyak sekali kader PDI Perjuangan yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD), bahkan banyak kader-kader tingkat desa yang tidak bersekolah. Makanya PDI Perjuangan harus berupaya lebih mengoptimalkan pengkaderan kepada para anggota PDI Perjuangan sampai pada tingkat Anak Ranting” (wawancara, 17 Juni 2011).



Mengingat diperlukan kaderisasi terhadap anggota partai untuk meningkatkan kualitas SDM anggota PDI Perjuangan serta untuk pelaksanaan program partai, dana menjadi faktor yang penting. Terbatasnya dana menjadi hambatan pelaksanaan rekrutmen. Berkaitan dengan pendanaan, Koes Pujiharto menjelaskan sebagai berikut.

“Dana PDI Perjuangan diperoleh dari pemerintah, anggota PDI Perjuangan yang menjadi anggota DPRD serta dari iuran anggota. Dana yang ada sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti untuk pendanaan kegiatan dan agenda DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, pelaksanaan program partai, gaji staf DPC, dll. Iuran anggota juga tidak masuk ke DPC dengan lancar.

Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam mengatasi hambatan pendanaan antara lain bahwa PDI Perjuangan membuat program kerja tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan partai melalui iuran wajib anggota fraksi, iuran kader yang duduk di eksekutif, iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, sumbangan dari negara dan pembentukan koperasi partai” (wawancara, 27 April 2011).

Faktor penghambat rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang lainnya berkaitan dengan persaingan dengan partai politik lain yang ada di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Tejo Wahono, kader PDI Perjuangan sebagai berikut.

“Banyaknya jumlah partai politik di Indonesia ini menyebabkan persaingan antara PDI Perjuangan dengan partai politik lain dalam merekrut masyarakat untuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan seperti menjadi anggota dan kader PDI perjuangan. Tentunya partai politik akan saling bersaing dalam mengajak orang-orang yang berkualitas masuk dalam partainya, apalagi orang-orang yang sekiranya bisa menguntungkan untuk partai politiknya” (wawancara, 17 Juni 2011).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan, diperoleh informasi tentang beberapa faktor penghambat PDI

Perjuangan dalam melaksanakan rekrutmen politik, antara lain anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sebagai partainya kaum marjinal, sumber daya manusia PDI Perjuangan yang belum seluruhnya berkualitas karena faktor pendidikan, pengelolaan dana, serta persaingan dengan partai politik lain dalam merekrut orang-orang yang berkualitas yang nantinya dapat memajukan partai politiknya.

## **B. Pembahasan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan yaitu ketua DPC, wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi, dan rekrutmen serta kader PDI Perjuangan, kemudian dengan mengumpulkan data, arsip dan dokumen dari PDI Perjuangan Kabupaten Semarang, maka diperoleh informasi dan pembahasan sebagai berikut.

### **1. Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Partai politik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam setiap gerakan, kegiatan dan program partai termasuk dalam pelaksanaan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik, PDI Perjuangan harus mengikuti amanat Undang-Undang. Pembuatan peraturan PDI Perjuangan juga harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Fungsi rekrutmen yang dilaksanakan partai politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen dalam internal partai dan rekrutmen untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 29 mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota partai politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang yaitu rekrutmen terhadap anggota baru, rekrutmen pengurus partai, rekrutmen calon anggota legislatif dan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan rekrutmen politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk kelestarian partai dan mencetak pemimpin yang berkualitas.

Implementasi rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan dilakukan dengan cara ajakan persuasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh anggota di tingkatan struktural partai. Ajakan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dilakukan dengan mensosialisasikan ideologi, visi dan misi partai kepada masyarakat. Selain kader yang turun langsung

ke masyarakat, PDI Perjuangan juga mensosialisasikannya melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka web PDI Perjuangan yang dapat diakses di *www.pdi-perjuangan.org*. PDI Perjuangan lebih mengutamakan kesadaran dan kesukarelaan dari masyarakat untuk menjadi anggota PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi anggota partai.

PDI Perjuangan melakukan kaderisasi terhadap anggota dan seleksi kepemimpinan untuk memperoleh kader-kader PDI Perjuangan yang berkualitas, sehingga apabila kader-kader partai tersebut menduduki jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat bekerja dengan baik. Kader partai yang berkualitas dapat berguna untuk perkembangan dan kelestarian partai sendiri. Semakin banyak jumlah kader yang berkualitas, partai tidak akan kesulitan ketika akan mencalonkan kadernya dalam pemilu, karena semakin banyak jumlah kader partai yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan merupakan indikator keberhasilan partai dalam fungsi rekrutmen politik.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang berasal dari anggota DPC sendiri, oleh sebab itu perlu dipersiapkan anggota-anggota yang berkualitas untuk keperluan reorganisasi kepengurusan demi perkembangan dan kualitas partai. PDI Perjuangan telah mengupayakan perekrutan pengurus partai dengan selektif memilih orang-orang terbaik

dan ahli pada bidangnya, mengingat pengurus merupakan komponen yang penting bagi partai politik.

Perekrutan pengurus partai dilaksanakan dengan seleksi individu baik secara formal maupun informal atau dengan pemilihan dalam forum resmi. Mekanisme pergantian pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui forum resmi yaitu konferensi cabang (Konfercab). Cara perekrutan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dimulai dengan memilih ketua DPC dari nama-nama calon ketua yang di usulkan oleh utusan anak cabang partai berdasarkan hasil rapat PAC. Ketua yang terpilih berwenang menyusun kepengurusan DPC dibantu anggota formatur yang dipilih oleh utusan Konfercab.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang merupakan pemimpin bagi anggota-anggotanya dan sebagai motor penggerak PDI Perjuangan di wilayah Kabupaten Semarang, sehingga pengurus partai harus memiliki sifat ideal seorang pemimpin agar kepengurusan berjalan dengan lancar dan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Herman Finer dalam Sastroadmodjo (1995:9), sifat ideal seorang pemimpin yaitu sebagai berikut: 1) kesadaran, 2) Kebulatan Pandangan, 3) ketetapan jiwa, 4) keyakinan, 5) kreativitas, 6) kepekaan hati nurani, 7) keberanian, 8) kemampuan memukau, dan 9) kepandaian.

Selain merekrut anggota baru dan pengurus partai, partai politik juga berfungsi melakukan rekrutmen terhadap anggota atau masyarakat

untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan melalui pemilu. Pemilihan umum dilaksanakan di negara demokrasi sebagai bentuk implementasi rotasi kekuasaan. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 dan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten Semarang dalam pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati tahun 2010.

Partai politik memiliki tujuan untuk menempatkan kader partainya dalam jabatan politik yang nantinya ikut serta menjalankan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan hakikat partai politik sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama; di mana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang ditetapkan.

Perkembangan demokrasi dan pendidikan masyarakat, menjadikan masyarakat lebih selektif memilih caleg yang akan dipilih. Untuk itu para calon legislatif yang mewakili partai harus bisa merebut hati masyarakat agar mendapatkan dukungan dalam pemilu legislatif. Pemilu legislatif merupakan kesempatan bagi partai untuk memperjuangkan kader-kader terpilihnya untuk mendapatkan jabatan

di lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Implementasi rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh PDI Perjuangan dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan PDI Perjuangan. Hal ini dapat digunakan partai untuk merekrut anggota baru, karena salah satu syarat bagi masyarakat yang bisa dijangkau oleh partai harus bisa menunjukkan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA). Bagi partai yang memiliki banyak kader berkualitas tidak terlalu sulit dalam menentukan nama-nama yang akan dijangkau dan disaring sebagai calon pemimpin. Lain halnya jika partai tidak memiliki banyak kader pilihan, maka harus merekrut calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari eksternal partai.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik**

### **a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang**

Keberhasilan partai tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen dalam partai politik baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Faktor pendukung sehingga PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dapat melaksanakan fungsinya dalam merekrut anggota,

pengurus DPC, calon legislatif dalam pemilihan legislatif 2009 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dalam Pemilu 2010 antara lain didukung adanya pengorganisasian yang solid dalam tubuh partai. Struktur organisasi yang kokoh hingga ke tingkat dusun atau Rukun Warga (RW) memudahkan kader untuk terlibat langsung dengan masyarakat. Kader PDI Perjuangan di tingkat ranting dan anak ranting akan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat karena lingkup tidak terlalu luas. DPC PDI Perjuangan dapat berkoordinasi dengan PAC, pengurus ranting dan anak ranting tentang perkembangan PDI Perjuangan di masing-masing wilayah.

Basis PDI Perjuangan yang nasionalis sesuai dengan kondisi sebagian besar masyarakat Kabupaten Semarang yang berbasis nasionalis, sehingga memudahkan partai dalam menyampaikan ideologi, visi dan misi partai ke masyarakat. Visi dan misi partai serta program kerja partai akan lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan keinginan masyarakat Kabupaten Semarang yang sebagian besar berbasis nasionalis.

Kemenangan-kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu di tingkat Kabupaten Semarang menjadi salah satu pendukung partai dalam rekrutmen politik, dengan kemenangan PDI Perjuangan maka para individu yang berkeinginan untuk menjadi anggota DPRD, bupati/wakil bupati serta jabatan lainnya tertarik masuk keanggotaan PDI Perjuangan. Meskipun sering kali motivasi utamanya hanya



menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politik dalam memperoleh kekuasaan saja.

Masyarakat menjadi anggota PDI Perjuangan juga terdorong oleh kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan putrinya Megawati Soekarno Putri, kedua figur ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari eksistensi PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh lain dari PDI Perjuangan yang dikagumi oleh masyarakat sehingga mereka tertarik masuk keanggotaan PDI Perjuangan. Keaktifan kader PDI Perjuangan juga berpengaruh terhadap rekrutmen anggota baru PDI Perjuangan, kalau kader aktif maka anggota yang direkrut juga semakin meningkat. Selain keaktifan kader PDI Perjuangan, perilaku baik kader PDI Perjuangan di masyarakat juga mendukung antusias masyarakat masuk menjadi anggota PDI Perjuangan.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Proses pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Semarang tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai dan masyarakat, hal ini dikarenakan terdapat hambatan-hambatan sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Hambatan tersebut antara lain karena adanya anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik. Dewasa ini masyarakat menilai

partai politik mulai mementingkan kepentingan partainya saja ketika kader partai berhasil menduduki jabatan politik di pemerintahan. Program-program kerja yang dibuat oleh partai politik jarang yang bisa terealisasi secara riil di masyarakat. Anggota legislatif dan eksekutif yang diusung partai politik banyak yang kurang mampu menerapkan ideologi sebagai program kerja yang memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat.

Hambatan yang lain adalah pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sendiri sebagai partainya kaum marjinal, partainya para peminum, partai yang massanya arogan dan keras, padahal tidak selamanya pandangan masyarakat itu benar. PDI Perjuangan memiliki banyak kader yang baik, yang berhasil menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Tapi memang tidak semua anggota dan kader PDI Perjuangan berkualitas baik. SDM PDI Perjuangan yang belum seluruhnya berkualitas yang salah satunya disebabkan macetnya kaderisasi oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang juga menjadi hambatan dalam implementasi rekrutmen politik.

Perkembangan demokrasi di Indonesia membuat berkembangnya partai politik sangat pesat. Hambatan lain dari implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah persaingan dengan partai politik lain yang semakin banyak sehingga masyarakat kebingungan menentukan pilihan mereka. Persaingan dengan partai politik terjadi untuk memperebutkan dukungan dan orang-orang

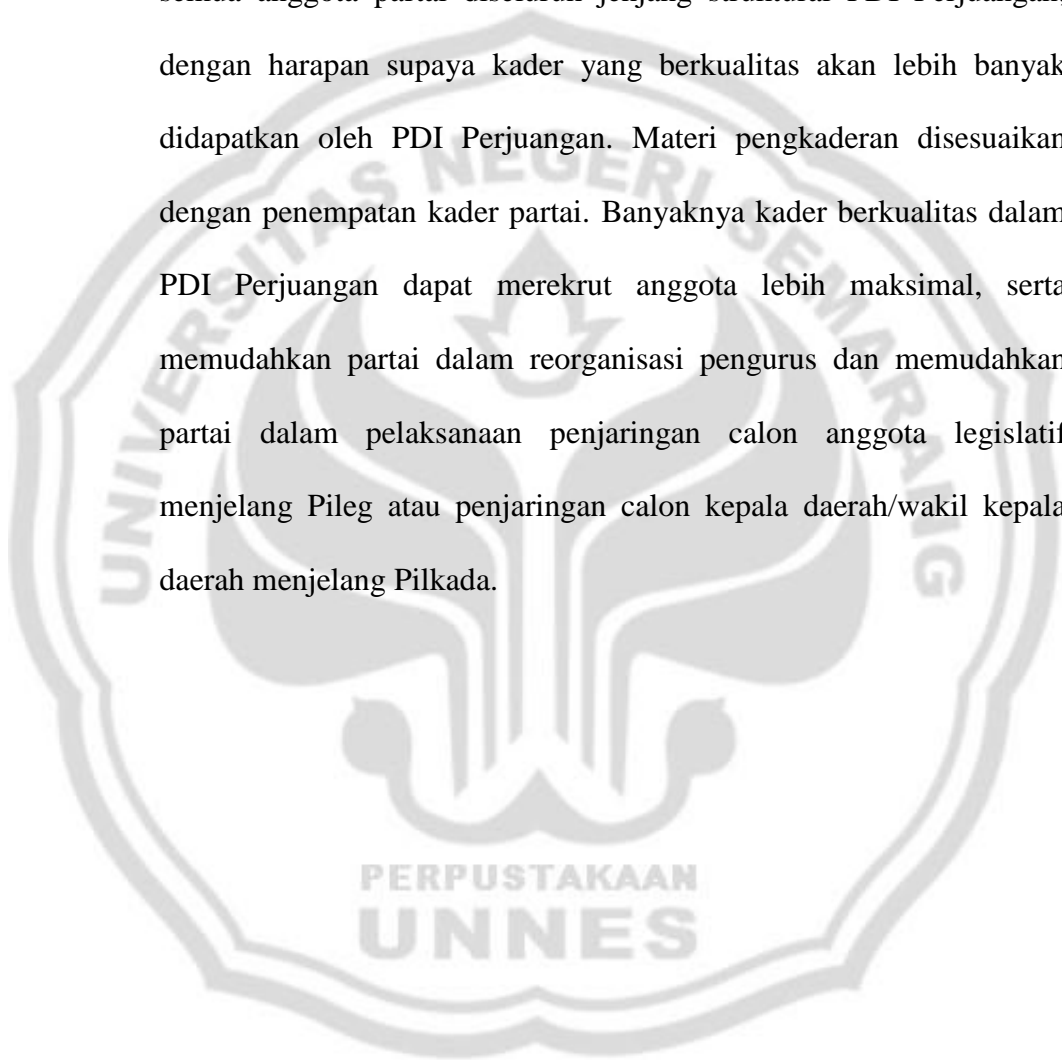
terbaik untuk masuk ke dalam partainya. Kadang kala persaingan tidak sehat sering menjadi fenomena dalam memperebutkan orang-orang yang dipandang bisa menguntungkan partainya.

Jika semua faktor dapat terpenuhi tetapi faktor dana masih kurang, akan menjadi hambatan juga dalam implementasi rekrutmen politik. Dana diibaratkan sebagai bahan bakar mobil, tidak bisa berjalan apabila bahan bakar telah habis. Dana diperlukan untuk pelaksanaan program partai, melakukan sosialisasi di masyarakat dan biaya operasional lainnya dalam implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan. Kurangnya dana yang ada, membuat agenda dan program partai tidak terlaksana secara keseluruhan. PDI Perjuangan mengupayakan penguatan infrastruktur salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

PDI Perjuangan dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memprioritaskan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan tidak mencemari citra partai politik dengan melakukan tindakan seperti korupsi, pelecehan seksual, narkoba dan psikotropika oleh anggota partai apalagi kader partai yang menduduki jabatan strategis pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Bahkan sebagai kader PDI Perjuangan yang telah diperjuangkan dan terpilih

menjadi wakil dan pemimpin rakyat, harus dapat menjadi figur wakil dan pemimpin yang baik bagi rakyatnya.

PDI Perjuangan mengupayakan untuk mengoptimalkan kembali kaderisasi secara intensif 3 (tiga) bulan sekali yang mencakup semua anggota partai diseluruh jenjang struktural PDI Perjuangan, dengan harapan supaya kader yang berkualitas akan lebih banyak didapatkan oleh PDI Perjuangan. Materi pengkaderan disesuaikan dengan penempatan kader partai. Banyaknya kader berkualitas dalam PDI Perjuangan dapat merekrut anggota lebih maksimal, serta memudahkan partai dalam reorganisasi pengurus dan memudahkan partai dalam pelaksanaan penjaringan calon anggota legislatif menjelang Pileg atau penjaringan calon kepala daerah/wakil kepala daerah menjelang Pilkada.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Rekrutmen anggota baru dilakukan oleh seluruh kader PDI Perjuangan dengan berbagai cara antara lain ajakan, persuasi serta mensosialisasikan eksistensi partai melalui koran, majalah, televisi dan *website* serta melalui keaktifan kader PDI Perjuangan.
2. Pelaksanaan rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang setiap lima tahun sekali melalui Konfercab. PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mempunyai 19 PAC sehingga dalam pembentukan pengurus DPC berjumlah 15 orang.
3. PDI Perjuangan bertanggung jawab mengajukan kader yang terbaik untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Untuk memperlancar proses penentuan kader terbaik tersebut, maka pelaksanaan rekrutmen calon legislatif oleh PDI Perjuangan melalui tahap penjaringan, penyaringan dan penetapan.
4. Rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Semarang dalam Pilkada 2010 dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan melalui tahap penjaringan, penyaringan tahap I (satu) dan II (dua).

5. PDI Perjuangan melaksanakan kaderisasi untuk meningkatkan SDM partai, menyiapkan kader partai yang berkualitas yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader , seminar, dan diklat kader PDI Perjuangan.
6. Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah:
  - 1) kondisi masyarakat Kabupaten Semarang yang berbasis nasionalis sesuai basis PDI Perjuangan, 2) pengorganisasian partai yang solid sampai Anak Ranting, 3) organisasi sayap PDI Perjuangan yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, 4) kemenangan PDI perjuangan dalam beberapa pemilu, 5) keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, dan 5) kekaguman masyarakat terhadap figur Bung Karno dan Megawati.
7. Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PDI Perjuangan adalah:
  - 1) dana, 2) SDM anggota partai, 3) anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, 4) citra PDI Perjuangan sebagai partai yang keras dan arogan, 5) terhentinya pelaksanaan kaderisasi dalam PDI Perjuangan, dan 6) program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.
8. Upaya yang dilakukan PDI Perjuangan untuk mengatasi hambatan rekrutmen politik dengan cara:
  - 1) menjalankan kaderisasi 2) meyakinkan masyarakat dengan merealisasikan secara nyata program kerja yang telah dibuat, dan 3) penguatan infrastruktur partai salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Partai politik perlu meningkatkan implementasi kinerja partai serta merealisasikan program kerja partai secara riil yang bermanfaat untuk masyarakat agar usaha untuk mengajak masyarakat bergabung dengan partai berhasil dengan lebih baik.
2. Mengingat pentingnya kaderisasi, maka PDI Perjuangan perlu mengoptimalkan kembali kaderisasi. Kaderisasi hendaknya dilakukan secara terus menerus dan mencakup seluruh anggota partai agar partai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) partai sehingga memudahkan partai untuk keperluan reorganisasi pengurus partai dan penjurangan calon legislatif dan calon kepala daerah.
3. Perlu dikembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh PDI Perjuangan, mengingat selama ini semua keputusan partai dimobilisasi oleh DPP dan tingkatan struktural di bawah hanya mengikuti apa yang diinstruksikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
4. PDI Perjuangan perlu menampilkan eksistensi partai, misalnya melalui dialog terbuka secara berkala dengan kelompok-kelompok masyarakat, kalangan intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat yang diliput secara meluas oleh media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat dapat lebih mengenal PDI Perjuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2010-2015.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah Ph. D. 2007. *Marketing Politik - Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- 2008. *Mengelola Partai Politik - Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan keenam.
- Hamid, Ahmad. F. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh - Desentralisasi Politik dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemirnaan.
- Hikam, Muhammad AS dkk. 1999. *Mbak Mega Saya Ikut Sampeyan*. Jakarta: Lingkaran Jurnalistik.
- [http://wikipedia/Partai\\_Demokrasi\\_Indonesia\\_Perjuangan.htm.com](http://wikipedia/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan.htm.com)
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cetakan kesembilan.
- Kusriyanto, Bambang. *Peran Parpol Dalam Membangun Kehidupan Demokrasi*, majalah Interupsi, edisi 98 / Th. VIII / Nopember 2010.
- Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas.
- Maran, Rafael. R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan kedua.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. (diterjemahkan dari judul aslinya *Introduction to Political Sociology* oleh Kartini Kartono). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh.



- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Partai Politik di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.
- Umar, Husein. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Edisi Revisi dan Perluasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.



## PEDOMAN DAN HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Koes Pujiharto  
Jabatan : wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen  
Alamat : Jalan Jagalan No. 58, Ungaran Barat  
Daftar Pertanyaan :

1. Apa saja yang menjadi lingkup kerja wakabid organisasi, keanggotaan, kaderisasi dan rekrutmen?

Jawab: “Lingkup kerjanya adalah penataan organisasi dari anak ranting, ranting, anak cabang sekaligus sebagai ajang konsolidasi partai untuk melaksanakan kaderisasi, rekrutmen, keanggotaan partai. Untuk lebih jelas lingkup kerjanya dapat dilihat pada SK No. 032/KPTS/DPP/X/2005 tentang Pedoman Pembentukan Departemen PDI Perjuangan”.

2. Rekrutmen politik apa saja yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Rekrutmen yang dilakukan ya sesuai Undang-Undang partai politik, yaitu rekrutmen anggota baru, rekrutmen pengurus DPC, rekrutmen Caleg, dan rekrutmen calon kepala daerah”.

3. Peraturan-peraturan apa saja yang menjadi landasan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam implementasi rekrutmen politik?

Jawab: “Peraturan yang selalu menjadi pedoman adalah AD ART PDI Perjuangan, selain itu ada SK dari DPP. Tentang rekrutmen anggota ada SK sendiri, rekrutmen Caleg ataupun calon kepala daerah juga sudah ada SK DPP yang mengaturnya. Tentunya peraturan partai dibuat berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah”.

4. Siapa saja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan rekrutmen politik DPC PDIP Kabupaten Semarang?

Jawab: “Seluruh elemen partai struktural, kader dan simpatisan yang di koordinir oleh DPC terlibat dalam pelaksanaan perekrutan anggota baru”.

5. Menurut Anda, apa saja indikator PDI Perjuangan berhasil melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik?

Jawab: “Indikator keberhasilan biasanya mudah dilihat dan dirasakan, antara lain ialah struktural partai semua tingkatan dalam kondisi solid, semua agenda organisasi akan bisa dilaksanakan dengan lancar, perolehan suara dalam even Pilkada, Pilpres, Pileg akan berhasil dengan baik dengan perolehan suara yang signifikan siapapun calon yang diajukan”.

6. Bagaimana implementasi rekrutmen anggota baru pada PDI Perjuangan?

Jawab: “Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Semarang mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART PDI Perjuangan dan SK Nomor 101/KPTS/DPP/I/2007 tentang Sistem Penerimaan Anggota dan Manajemen Informasi Keanggotaan PDI Perjuangan”.

7. Bagaimana bentuk sosialisasi PDIP Kabupaten Semarang terhadap masyarakat agar ikut andil mendaftar sebagai anggota PDI Perjuangan?

Jawab: “Rekrutmen anggota baru partai merupakan keberhasilan dari sosialisasi partai. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai apa saja yang ada di PDIP bisa melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka web PDI Perjuangan yang dapat diakses di [www.pdi-perjuangan.org](http://www.pdi-perjuangan.org). Berkaitan dengan rekrutmen anggota, salah satu sosialisasi difokuskan terhadap kinerja partai dalam kehidupan masyarakat. Jika kinerja partai dinilai baik oleh masyarakat, maka masyarakat akan tertarik dengan sendirinya untuk mendukung bahkan masuk menjadi anggota PDI Perjuangan. Jadi menjadi anggota PDIP adalah kesadaran masyarakat. Siapa yang tertarik ya monggo silahkan masuk. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang variatif tergantung pada kondisi masyarakat dan wilayahnya. Sebagai contohnya PDI Perjuangan membantu pembangunan jalan desa dan gapura untuk beberapa desa yang berhasil memperoleh suara yang signifikan dalam kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu”.

8. Sampai tahun 2011 ini, bagaimana antusias masyarakat untuk masuk menjadi anggota PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “kecenderungan meningkat dan setelah memenangkan Pilkada maka trend positif naik teris terhadap PDI Perjuangan”.

9. Apa yang membedakan anggota dan kader PDI Perjuangan?

Jawab: “kader partai adalah anggota yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan pengabdian kepada partai serta kepada masyarakat. Kader partai dalam konteks ini adalah kader PDIP direkrut dari anggota partai yang berkelakuan tidak tercela dan telah berjasa kepada PDI Perjuangan”

10. Bagaimana Ketentuan jangka waktu menjadi anggota PDI Perjuangan?

Jawab: “Lamanya keanggotaan PDIP tidak dibatasi, selama anggota partai tidak melakukan penyimpangan, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai, maka masih berstatus sebagai anggota PDIP. Penyimpangan tersebut contohnya adalah menjadi anggota parpol lain. Berbagai penyimpangan akan mendapat sanksi dari partai”.

11. Bagaimana implementasi kaderisasi yang di laksanakan oleh PDIP?

Jawab: “Kaderisasi dilakukan oleh PDIP untuk mentransfer pengetahuan politik yang terkait dengan ideologi, sejarah, misi, visi, dan strategi politik PDIP, selain itu juga hal-hal yang terkait dengan pemerintahan, bangsa dan negara. Kaderisasi dilaksanakan tidak hanya ada pada tingkat DPC saja, melainkan pengurus DPC mendapatkan pendidikan dan kaderisasi dari DPD, DPP, maupun dari pemerintah. Pengurus DPC yang sudah dikader, untuk kemudian melakukan kaderisasi pada anggota-anggotanya yang ada pada tingkat DPC dan tingkatan dibawahnya”.

12. Bagaimana implementasi rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Pelaksanaannya mengacu pada SK No 435/KPTS/DPP/XI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Rapat PAC, Konfercab, Konferda, dan Kongres III PDI Perjuangan. Pergantian pengurus di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dilaksanakan setiap lima tahun sekali melalui Konfercab. Konfercab dilaksanakan setelah kongres partai dan Konferda”.

13. Bagaimana implementasi rekrutmen calon legislatif oleh DPC PDIP Kabupaten Semarang dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009?

Jawab: “Dilaksanakan mengacu pada SK Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009.

14. Apa saja persyaratan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Semarang dalam pemilu legislatif tahun 2009?

Jawab: “Selain persyaratan yang sudah ada dalam SK tersebut, anggota partai yang mendaftar sebagai calon anggota legislatif harus mengisi dan mengembalikan formulir rekrutmen di struktur partai tempat yang bersangkutan mendaftar, kemudian berhak mendapatkan tanda bukti rekrutmen dari struktural partai yang bersangkutan, dengan membayar biaya pendaftaran Caleg sebesar Rp 500.000,00. Biaya tersebut masuk ke DPC diluar dana kampanye calon anggota legislatif”

15. Ceritakan secara garis besar tahapan disebutkan dalam SK DPP tersebut?

Jawab: “Penyaringan dimulai dengan pengisian formulir rekrutmen Caleg oleh anggota partai yang direkrut disertai dengan data pendukung bukti diri, sesuai dengan format dokumen yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan. DPC membawa seluruh nama bakal Caleg yang terjaring di Musancabsus dan yang dijaring oleh DPC partai ke Rakercabsus. Sebelum dilakukan verifikasi, nama-nama yang terjaring diumumkan dalam forum Rakercabsus/Rakerdasus. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap kebenaran pengisian formulir rekrutmen dan kebenaran data pendukung bukti diri calon legislatif”.

16. Bagaimana ketentuan jadwal pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2009?

Jawab: “Jadwal pelaksanaan dan target waktu penyelesaian penjaringan dan penyaringan calon legislatif bersifat mengikat, dan harus menjadi acuan dalam proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan oleh

struktur partai pada semua tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PDI Perjuangan melalui SK.

17. Adakah ada sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2009?

Jawab: Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan di dalam seluruh proses, baik tahap penjaringan, penyaringan, dan penetapan nomor urut dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin organisasi partai dan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan AD-ART partai serta peraturan disiplin organisasi partai agar tercipta ketertiban bukan kecurangan-kecurangan pada intern partai”.

18. Bagaimana implementasi rekrutmen pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil bupati Kabupaten Semarang dalam pilkada 2010 berdasarkan SK Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009. Tetapi pada saat ini, sudah ada SK baru sebagai bentuk penyempurnaan dari SK Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009, yaitu SK Nomor 031/KPTS/DPP/III/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi PDI Perjuangan. Penyempurnaan SK ini dibuat atas dasar evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen Cabup/Cawabup di beberapa daerah yang telah melaksanakan pemilikada, ditemukan kendala internal maupun eksternal partai.”.

19. Ceritakan secara garis besar tahapan rekrutmen calon kepala daerah yang ada pada SK tersebut?

Jawab: “Penjaringan dilakukan untuk menampung aspirasi dari internal partai yang dilakukan oleh DPC PDIP untuk menghimpun nama-nama bakal calon bupati/wakil bupati berdasarkan kriteria peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku. Penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu penyaringan tahap pertama yang dilakukan oleh DPD melalui rapat DPD dengan mempertimbangkan soliditas partai, komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik partai, hasil survey

terkait dengan elektabilitas bakal calon, kekuatan dukungan riil bakal calon untuk memenangkan pemilukada, dan pemetaan politik yang dilakukan DPC dan DPD Partai khususnya terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan pemilukada. Nama-nama yang sudah direkomendasikan dilakukan penyaringan tahap kedua oleh DPP PDIP guna menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, dukungan internal partai dan peluang memenangkan Pemilukada”.

20. Persyaratan apa saja yang ditetapkan DPC PDIP untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dalam Pilkada tahun 2010 kemarin?

Jawab: “seluruh syarat sudah ada di SK, urutannya seperti ini, setiap bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah wajib mengambil formulir pendaftaran untuk kemudian diisi dan diserahkan kepada DPC PDIP, dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung peserta sebagai bukti otentik atas seluruh keterangan yang diberikan, serta uraian yang berkaitan dengan visi misi dan komitmen bakal calon terhadap PDIP. Setelah itu dilakukan verifikasi dalam rapat partai untuk meneliti tentang kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Verifikasi yang dilakukan yaitu mencakup pengalaman kerja, pengabdian pada PDIP, ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan. Hasil verifikasi tingkat kabupaten/kota disampaikan kepada DPD Partai, kemudian diteruskan ke DPP PDIP”.

21. Faktor apa saja yang mendukung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Adanya organisasi sayap PDI Perjuangan seperti Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia, Taruna Merah Putih yang direkrut dari beberapa kalangan masyarakat dapat membantu memperoleh anggota baru dan memperkuat dukungan terhadap partai menjelang pesta demokrasi yaitu pemilihan umum. Selain itu seleksi kepemimpinan yang cukup baik sehingga dalam menampilkan tokoh-tokoh sebagai pemimpin

dan wakil rakyat, PDIP tidak kesulitan mencari kader berkualitas yang akan diperjuangkan dalam pemilu untuk menempati jabatan politik”.

22. Faktor apa saja yang menghambat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Ya dana mbak, dana PDI \P diperoleh dari pemerintah, anggota PDIP yang menjadi anggota DPRD serta iuran anggota. Dana sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Iuran anggota juga tidak masuk dengan lancar, sehingga apabila terdapat kendala dalam pendanaan. Selain itu citra partai politik yang semakin memburuk dimata masyarakat.

23. Bagaimana upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “PDIP melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa partai politik berfungsi untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Selain itu, PDIP memberikan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pengurus, anggota, dan kadernya dan masyarakat umum melalui pertemuan, dialog publik maupun mass media. Selain itu, PDIP akan berusaha selektif mungkin dalam perekrutan anggota Caleg dan Cabup/Cawabup agar tidak ada utusan dari PDI Perjuangan yang mengecewakan rakyat. Mengenai dana, PDIP mengkonsultasikan dengan anggota yang menduduki jabatan politik, serta mendekati para pengusaha untuk menjadi donatur partai bahkan mengajaknya masuk dalam keanggotaan PDIP. Selain itu, PDIP membuat program kerja tentang pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan partai melalui iuran wajib anggota fraksi, iuran kader yang duduk di eksekutif, iuran anggota, sumbangan tidak mengikat, sumbangan dari negara dan pembentukan koperasi partai”.



## INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Informan : H. Bambang Kusriyanto, B.Sc.

Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Brigjend Katamso II No. 1 Susukan, Ungaran Timur

Daftar Pertanyaan :

1. Sejauhmana keterlibatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan rekrutmen politik?

Jawab: “Ketua DPC sebagai penanggung jawab pelaksanaan rekrutmen anggota baru akan melaksanakan agenda rapat di berbagai tingkatan, seperti dalam forum rakercab dan rakerancab. Dalam ajang konsolidasi tersebut diberikan pemahaman, diskusi, intruksi terhadap semua kader dan simpatisan dalam hal pelaksanaan rekrutmen anggota baru PDIP”

2. Menurut Anda, apa saja indikator PDI Perjuangan berhasil melaksanakan fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik?

Jawab: “Bahwa keberhasilan rekrutmen dapat dilihat dari: 1) regenerasi pengurus partai berjalan lancar, 2) keterlibatan kaum muda dalam unsur unsur partai, 3) soliditas partai, dan 4) hasil Pemilu yang baik”.

3. Bagaimana implementasi rekrutmen anggota baru pada PDI Perjuangan?

Jawab: “Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD, DPC, PAC, Pengurus Ranting dan PAR dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diusulkan untuk diberikan KTA setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai”.

4. Bagaimana implementasi kaderisasi yang dilaksanakan oleh PDIP?

Jawab: “Kaderisasi dalam PDIP diperlukan untuk dapat menyaring anggota maupun kader yang memang se-asas, seideologi dan satu tujuan dengan partai, menyiapkan kader-kader partai, serta pengurus partai yang berkualitas. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh DPC salah satunya dengan diadakan pemantapan ideologi partai, sosialisasi sikap politik dan pemahaman organisasi politik kepada struktur partai maupun kader partai

setiap setahun satu kali. Bentuk kegiatannya berupa lokakarya, Kursus Guru Kader seminar, diklat kader PDIP dan dialog publik”.

5. Bagaimana implementasi rekrutmen pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Pengurus partai dalam PDI Perjuangan adalah susunan pengurus partai yang dipilih dan ditetapkan dalam forum resmi partai dengan Surat Ketetapan oleh pengurus partai dua tingkat di atasnya berdasarkan rekomendasi dari pengurus partai satu tingkat di atasnya, kecuali untuk pengurus DPC dan DPD partai ditetapkan dengan SK DPP partai”.

6. Bagaimana implementasi rekrutmen calon legislatif oleh DPC PDIP Kabupaten Semarang dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009?

Jawab: “PDI Perjuangan bertanggung jawab dan berkewajiban mengajukan kader-kader partai yang terbaik, serta memiliki disiplin yang tinggi untuk dipilih sebagai perwakilan partai dilembaga legislatif. Dimaksudkan untuk memperlancar proses penentuan kader-kader partai yang terbaik tersebut, maka diperlukan seleksi dengan cara penjarangan, penyaringan dan penetapan calon legislatif sesuai SK DPP PDI Perjuangan. SK tersebut adalah SK Nomor 210/KPTS/DPP/V/2008 tentang Tata Cara Penjarangan, Penyaringan dan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan DPR-RI PDI Perjuangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2009”.

7. Bagaimana implementasi rekrutmen pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Pelaksanaan rekrutmen calon bupati dan/atau wakil bupati Kabupaten Semarang dalam pilkada 2010 berdasarkan SK Nomor 243/KPTS/DPP/X/2009”.

8. Faktor apa saja yang mendukung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Kondisi masyarakat Kabupaten Semarang sebagian besar berbasis nasionalis, serta pengorganisasian PDIP yang solid dibuktikan dengan struktur partai yang terdapat anggota dan kepengurusan partai sampai

dengan tingkat dusun atau RW. Kondisi masyarakat Kabupaten Semarang sebagian besar berbasis nasionalis, sesuai dengan basis dari PDIP sendiri, sehingga memudahkan dalam menyampaikan visi misi partai dan memudahkan dalam pendekatan dengan masyarakat untuk mendapat dukungan. Kabupaten Semarang sebagian besar berbasis nasionalis dapat dibuktikan dengan perolehan suara hasil pemilu dari tahun 1955 sampai dengan tahun 2009 dimenangkan oleh partai basis nasionalis. Selain itu, dengan adanya kemenangan-kemenangan PDIP di tingkat Kabupaten Semarang, dengan sendirinya akan mendorong antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PDIP terlebih pada individu yang bermaksud mencalonkan diri dalam jabatan politik dengan mengendarai PDIP sebagai mesin politik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan pada PDIP selama wakil-wakil PDIP yang menjadi wakil rakyat di DPR dan DPRD dan yang menjadi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih dapat membuktikan kinerja dan kredibilitas yang bekerja untuk rakyat dan demi kepentingan rakyat. Masyarakat akan mendukung PDIP apabila dapat melahirkan tokoh-tokoh yang berkompeten”.

9. Faktor apa saja yang menghambat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Adanya pandangan masyarakat terhadap PDI Perjuangan sebagai partainya kaum marjinal dan daerah basis islam beranggapan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai sekuler. Selain itu adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik karena ulah para politikus yang kurang bahkan tidak baik. Hambatan lain adalah SDM dari anggota PDIP belum seluruhnya berkualitas, serta dana sebagai penunjang pelaksanaan rekrutmen sendiri masih sering menjadi kendala dalam rekrutmen politik”.

## INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Informan : Tejo Wahono  
Jabatan : Kader PDI Perjuangan Kabupaten Semarang  
Alamat : Dusun Lewono Kelurahan Beji, Ungaran Timur  
Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana proses Anda menjadi anggota PDIP Kabupaten Semarang?

Jawab: “Biasa mbak, sesuai prosedur dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DPC. Untuk kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PDI Perjuangan, setelah menjadi anggota harus mematuhi AD ART partai dan peraturan partai lainnya”.

2. Menurut Anda, apakah ada persyaratan yang sulit dipenuhi untuk menjadi kader PDI Perjuangan? jelaskan jawaban Anda!

Jawab: “Tidak ada mbak, soalnya sudah ada niat dan tekad dalam diri saya, keluarga saya juga marhainisme dari dulu. Sehingga tidak merasa sulit memenuhi persyaratan dari PDIP.

3. Bagaimana implementasi rekrutmen terhadap anggota baru pada PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Menjelang pemilu, biasanya seluruh kader diinstruksikan untuk mendekati masyarakat sehingga mendapat dukungan suara. Caranya bermacam-macam tergantung masyarakatnya. Kalau yang saya lakukan sebagai kader PDIP di wilayah saya, salah satunya dengan mendekati pemuda lewat karang taruna. Mereka butuh apa ya saya usulkan ke PDIP untuk mendapat tindak lanjut. Contohnya pemuda di desa saya gemar sepak bola, ya kami menyumbang bola dan perbaikan lapangan. Tidak hanya membantu dana saja, tetapi ya saya datang kalau ada rapat-rapat karang taruna. Jika sosialisasi berhasil dengan baik, mungkin warga ada yang berminat mendaftarkan diri ke PDIP, tidak hanya sebagai simpatisan saja atau hanya mencoblos PDIP saja”.

4. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kader PDI Perjuangan untuk merekrut anggota?

Jawab: “Sebagai kader, saya harus bisa membaur dengan masyarakat dan menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Contohnya jika ada kerja bakti di lingkungan ya harus ikut. Ada undangan rapat, pengajian ya menghadiri. Kader juga harus aktif di masyarakat. Jadi pandangan masyarakat jika PDIP partainya peminum, atau partai yang kasar dapat diperbaiki dengan sikap terpuji kader-kader PDIP di masyarakat. Selain kader, tokoh-tokoh PDIP ditingkat pusat sampai daerah juga sangat mempengaruhi minat warga. Kalau figur-figur PDIP yang ada di pusat rukun, bekerja dengan baik ya warga akan tertarik masuk PDIP, lain halnya jika kader PDIP diberitakan di Televisi atau di koran kena kasus ya warga tidak akan tertarik pada PDIP bahkan kecewa terhadap PDIP”

5. Bagaimana implementasi kaderisasi yang diberikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Pengkaderan yang dilakukan DPC PDIP Kabupaten Semarang yaitu melalui pelatihan dan pendidikan kader sekurangnya 3 (tiga) bulan sekali dengan materi pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan penempatan kader. Namun akhir-akhir ini pengkaderan oleh DPC PDIP macet pelaksanaannya”.

6. Sejauh mana peran kader PDI Perjuangan dalam implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Keaktifan kader PDI Perjuangan sangat berperan dalam merekrut anggota. Terlebih kader yang ada di ranting dan anak ranting yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Keberhasilan PDI Perjuangan di Kabupaten Semarang tidak terlepas dari peran penting pengurus ranting dan pengurus anak ranting”.

7. Menurut Anda, faktor apa yang mendorong masyarakat untuk ikut serta menjadi anggota PDI Perjuangan?

Jawab: “Faktor yang mendorong warga masyarakat untuk memberi dukungan bahkan sampai menjadi anggota/kader PDIP salah satunya

karena figur dari tokoh-tokoh PDIP seperti figur Bung Karno dan figur Megawati yang masih banyak dikagumi masyarakat. Selain 2 (dua) figur itu, menurut saya kader PDIP juga mempengaruhi pilihan masyarakat. Jika kader-kader PDIP berperilaku baik, masyarakat juga akan menilai baik terhadap partai. Seperti saya untuk mengajak teman, tetangga ya saya harus berperilaku baik, dengan begitu dengan sendirinya masyarakat mengikuti langkah saya”.

8. Faktor apa saja yang menghambat implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “SDM partai memang belum seluruhnya berkualitas. tidak semua kader lulusan sarjana. Bahkan banyak yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD). Dulu tingkatan PAC ke atas itu sering mengadakan koordinasi, kaderisasi setiap 3 bulan, tapi sekarang pengkaderan itu sudah macet. Paling-paling menjelang Pemilu saja Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting dipanggil untuk keperluan kampanye dan strategi kemenangan PDIP. Jadi terkesan seperti habis manis sepagh dibuang”.

9. Bagaimana upaya yang dilakukan PDIP Kabupaten Semarang dalam menghadapi kendala dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Agar PDIP agar tidak ditinggalkan oleh anggota-anggotanya ya PDI Perjuangan berupaya menegakkan disiplin partai menjalankan kembali pengkaderan sampai tingkat Anak Ranting. Selain itu, banyaknya jumlah partai politik di Indonesia ini menyebabkan kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan mereka. Persaingan dengan partai politik lain dalam merekrut masyarakat untuk menjadi bagian dari PDI Perjuangan juga menjadi hambatan yang dialami PDI Perjuangan”.

## INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Informan : Bondan Marutohening

Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Serasi VII No. 3 Nitibuana, Ungaran Timur

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa jumlah anggota PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “Anggota PDI Perjuangan diperkirakan ada 11 (sebelas) juta anggota yang tersebar diseluruh Indonesia, sedangkan untuk anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang kurang lebih ada 30 ribuan, ditambah simpatisan sehingga total sekitar 50 ribu anggota”.

2. Bagaimana cara PDI Perjuangan Kabupaten Semarang melakukan rekrutmen politik?

Jawab: “PDI Perjuangan melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara persuasif, kita tidak ada brain washing atau uang, apa lagi cuci otak serta paksaan. Yang kita jual pada masyarakat adalah ideologi dan program partai. PDI Perjuangan berusaha menunjukkan konsisten terhadap ideologi partai serta konsisten pula dalam membuat dan menjalankan program partai. Disitulah masyarakat sendiri yang akan menilai apakah PDI Perjuangan layak untuk dijadikan partainya atau tidak”.

3. Salah satu syarat menjadi anggota adalah melalui masa pembinaan, apa maksudnya?

Jawab: “Masa pembinaan dilakukan selama 6 bulan dengan cara pengurus partai setempat memantau aktivitas calon anggota baru tersebut, apakah mereka taat atau tidak dengan garis partai. selama 6 bulan itu, anggota wajib merekrut sekurangnya 1 (satu) anggota baru. Individu yang telah mendaftar, saat mengembalikan formulir pendaftaran akan mendapat materi tentang seluk beluk PDI Perjuangan, AD/ART dan sharing langsung dengan kader/pengurus partai dijenjang struktural ia mendaftarkan diri”.

4. Faktor apa saja yang mendukung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang dalam melaksanakan rekrutmen politik?

Jawab: “Untuk rekrutmen anggota baru, faktor pendorongnya adalah kekuatan kharismatik Ir. Soekarno sebagai tokoh marhainisme serta tokoh yang berkaitan dengan ideologi PDI Perjuangan. Kalau dalam perekrutan pengurus DPC atau penjaringan calon anggota legislatif PDI Perjuangan tidak terlalu kesulitan, karena banyak kader PDI Perjuangan yang berkualitas untuk kepentingan reorganisasi kepengurusan DPC, juga banyak kader PDI Perjuangan yang berantusias mencalonkan diri sebagai calon legislatif, sehingga partai tidak perlu merekrut orang di luar partai untuk dijarah menjadi calon anggota legislatif”.

5. Faktor apa saja yang menghambat implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan Kabupaten Semarang?

Jawab: “dana terutama, sebab dana merupakan faktor yang penting bagi berjalannya kegiatan, program kerja, dsb. Selain itu persaingan dengan partai-partai lain. Terus pandangan masyarakat yang menganggap PDI Perjuangan sebagai partainya kaum marjinal dan sebagai partai sekuler”.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam rekrutmen politik?

Jawab: “Partai memberikan sosialisasi kepada pengurus atau kader dan kepada masyarakat, lewat pertemuan maupun mass media”.

7. Menurut Anda, apa yang menjadi indikator bahwa PDI Perjuangan dalam implementasi rekrutmen politik dikatakan berhasil?

Jawab: “Bahwa keberhasilan rekrutmen dapat dilihat dari: 1) regenerasi pengurus partai berjalan lancar, 2) keterlibatan kaum muda dalam unsur unsur partai, 3) soliditas partai, dan 4) hasil Pemilu yang baik dan masih banyak lagi”.



**LAMPIRAN GAMBAR**

Gambar 1. Kantor sekretariat DPC PDIP Kabupaten Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 2. Ruang sekretariat DPC PDIP Kabupaten Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 3. wawancara dengan pengurus DPC PDIP Kab. Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 4. Pengurus dan staf DPC PDIP Kabupaten Semarang (Dok. Pribadi)



Gambar 5. Upacara 1 Juni 2011 DPC PDIP Kabupaten Semarang (Dok. DPC)